

SKRIPSI

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

disusun dan diajukan oleh
TALITA MARIA WALUJAN
A11115324



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh
TALITA MARIA WALUJAN
A11115324



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018**

disusun dan diajukan oleh

**TALITA MARIA WALUJAN
A11115324**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 9 Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

Pembimbing II



Dr. Sabir, SE., M.Si
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003



SKRIPSI

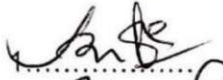




PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

disusun dan diajukan oleh

TALITA MARIA WALUJAN
A11115324

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 2 November 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si	Ketua	
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si.	Sekretaris	
3.	Dr. Indraswati T. A. Reviane, SE., MA.	Anggota	
4.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si.	Anggota	
5.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TALITA MARIA WALUJAN
NIM : A11115324
Jurusan / Program Studi : ILMU EKONOMI / STRATA SATU (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Talita Maria Walujan



PRAKATA

Segala Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2005-2018”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai jika tidak didukung oleh banyak pihak. Maka dari itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih lewat prakata ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Papa Jaffry August Waluyan dan Mama Marlin Naray yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, mendukung dan berjuang demi penulis. Bila penulis bisa tumbuh dan berkembang bahkan hingga tahap penyelesaian skripsi ini, itu semua berasal dari akar keluarga yang kuat yaitu Mama dan Papa. Tentunya semua ini penulis persembahkan terutama untuk mereka. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian hidup mama dan papa.

Terima kasih kepada adik penulis satu-satunya, Mozad Timothy Waluyan yang selalu mendukung dan mendampingi selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak akan bisa mencapai semua ini jika bukan karena peran penting beliau. Begitupun bagi seluruh keluarga besar Waluyan-Naray, terkhusus Alm Opa Hildebrand Robert Naray, Oma Marie Josephine Hosang dan adik-adik sepupu (Kel, Eca, Putri, Leo, Geral, Xelo dan Nicole). Doa, nasihat dan dukungan



dari mereka selalu menjadi semangat bagi penulis untuk terus berjuang agar skripsi ini boleh selesai. Untuk itu penulis berharap pencapaian ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus motivasi khususnya bagi adik-adik agar terus berjuang meraih mimpi dan menyelesaikan studi. Kiranya Tuhan senantiasa menganugrahkan kesehatan dan kekuatan serta mempersatukan kita terus.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Sabir, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II penulis atas kesediaan waktu dan keikhlasan memberikan arahan, nasehat, bimbingan, dan bantuan dari awal hingga akhir masa studi penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan rezeki kepada beliau. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

- Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
- Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya
- Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus Pembimbing I penulis dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
- Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., Dr. Hamrullah, SE., M.Si., dan Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si., selaku penguji. Terima kasih atas segala arahan, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.



- Kepada seluruh teman-teman ANTARES 2015 atas segala perhatian, bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Kiranya kita bisa terus menjaga ikatan ini agar tetap solid.
- Kepada seluruh teman-teman PMKO FE-UH yang telah kebersamai dan mendampingi penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih untuk Kak Yul, Dian, Oi, Mery, dan Ratu yang selalu menyemangati, membantu dan menemani terutama urusan kampung tengah. Terima kasih untuk Kak Icha dan teman-teman lain yang menemani selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap cerita dan pengalaman yang dibagikan, serta hal-hal menyenangkan yang boleh dilakukan selama waktu senggang. Kiranya kita senantiasa dipersatukan dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan.
- Kepada Hildayana dan Nur Rahmawati Sri Wulandari yang juga berperan besar dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih karena tidak pernah lelah membantu, mengingatkan, mendukung dan mendoakan.
- Kepada teman-teman seperjuangan bureng109 selain Hilda, yang telah menemani semenjak menjadi mahasiswa hingga sekarang yaitu Maudy dan Dewi. Semangat menyelesaikan tugas akhirnya.
- Kepada sahabat-sahabat selama SMA, The Blink Ring; Indri, Babas, Nanda dan Nining, juga teman-teman band Suddenly Project; Avud, Kiki, Kevin, Binna yang walau dipisahkan jarak namun tetap setia mengingatkan, mendukung dan mendoakan.
- Kepada Yeremia Dwi Hendryanto yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk sadar akan kewajiban dan tanggung jawab menyelesaikan studi.

ah karena beliau, penulis akhirnya berani mengambil langkah dan gajukan judul. Seluruh proses yang penulis lewati hingga bisa sampai



pada tahap akhir penyelesaian skripsi ini tidak pernah terlepas dari pendampingan, bantuan, kepercayaan, dukungan, dan doa dari beliau. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan dan masa depan.

- Kepada semua pihak yang mungkin tidak disebutkan diatas namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tuhan selalu memberkati dan menyertai seluruh kehidupannya.

Akhir kata, semoga ilmu pengetahuan pada skripsi ini tidak hanya sekedar persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana tetapi juga mampu menghantarkan manfaat kepada pembaca meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 23 Oktober 2020

Penulis



ABSTRAK

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Talita Maria Walujan
Sanusi Fattah Sabir

Inflasi merupakan indikator penting yang digunakan sebagai tolak ukur stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi harus senantiasa dijaga agar tetap terkendali sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, BI Rate dan belanja pemerintah, serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel BI Rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

Kata kunci : inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar, bi rate, belanja pemerintah, harga minyak dunia.



ABSTRACT

THE EFFECT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTOR ON INFLATION IN INDONESIA IN 2005-2018

Talita Maria Walujan
Sanusi Fattah Sabir

Inflation is an important indicator used as a measure of a country's economic stability. inflation must always be maintained so that it does not give bad impact on the economy. The purpose of this study is to determine the effect of internal factor such as money supply, exchange rate, BI rate, government expenditure, and external factor which is world oil prices on inflation in Indonesia in 2005-2018. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) analysis method to estimate the effect of the independent and dependent variables. The results showed that the money supply variable has a positive and significant effect on inflation. The exchange rate variable has a positive and significant effect on inflation. The BI rate variable has a positive and insignificant effect in inflation. The government expenditure variable has a negative and significant effect on inflation. The world oil price variable has a positive and significant effect on inflation.

Keywords : Inflation, money supply, exchange rate, bi rate, government expenditure, world oil price.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Tinjauan Teoritis.....	9
2.1.1. Konsep Inflasi.....	9
2.1.2. Konsep Jumlah Uang Beredar.....	13
2.1.3. Konsep Nilai Tukar	15
2.1.4. Konsep BI Rate	17
2.1.5. Konsep Belanja Pemerintah	19
2.1.6. Konsep Harga Minyak Dunia	21
2.2. Hubungan Teori Antar Variabel	22
2.2.2 Nilai Tukar terhadap Inflasi	24
2.2.3 BI Rate terhadap Inflasi	25
2.2.4 Belanja Pemerintah terhadap Inflasi	27
2.2.5 Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi	30
2.3. Penelitian Terdahulu.....	32



2.3.	Kerangka Konseptual	37
2.4.	Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Ruang Lingkup	40
3.2.	Jenis dan Sumber Data	40
3.3.	Metode Analisis dan Pengolahan Data	40
3.4.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian.....	45
4.1.1	Perkembangan Inflasi.....	45
4.1.2	Perkembangan Jumlah Uang Beredar	51
4.1.3	Perkembangan Nilai Tukar	53
4.1.4	Perkembangan BI Rate	58
4.1.5	Perkembangan Belanja Pemerintah	60
4.1.6	Perkembangan Harga Minyak Dunia	62
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	64
3.4.1.	Pengaruh Jumlah Uang Beredar (X2) terhadap Inflasi (Y)	66
3.4.2.	Pengaruh Nilai Tukar (X3) terhadap Inflasi (Y)	69
3.4.3.	Pengaruh BI Rate (X4) terhadap Inflasi (Y).....	72
3.4.4.	Pengaruh Belanja Pemerintah (X5) terhadap Inflasi (Y).....	74
3.4.5.	Pengaruh Harga Minyak Dunia (X6) terhadap Inflasi (Y)	75
BAB V PENUTUP		78
4.1.	Kesimpulan.....	78
4.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN.....		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Inflasi Target dan Inflasi Aktual Tahun 2001-2018.....	2
Tabel 4. 1 Total Pengeluaran Pemerintah Pusat (miliar rupiah)	61
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	39
--------------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Perkembangan Inflasi di Indonesia	46
Grafik 4. 2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) Milliar Rupiah	51
Grafik 4. 3 Harga Minyak Dunia (US dollar/barrel)	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	84
Lampiran 2.....	85
Lampiran 3.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stabilitas ekonomi suatu negara diantaranya tercermin dari adanya stabilitas harga. Hal ini akan terwujud apabila tidak terdapat gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu masalah utama makroekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator yang menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Jika terjadi gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri maka akan selalu dikaitkan dengan masalah inflasi (Sutawijaya dan Zulfahi, 2012).

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Dampak yang dihasilkan bisa positif atau negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Maka dari itu, setiap negara selalu berusaha menjaga agar inflasi tetap berada di posisi stabil. Sebagaimana yang dikemukakan Deviana (2014), jika inflasi tidak dapat dikendalikan atau terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian akan menjadi kacau dan lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.

Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Langi dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia mengatakan bahwa negara berkembang umumnya memiliki struktur

perekonomian yang masih bercorak agraris sehingga cenderung rentan dengan guncangan terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Menurut Kalalo



dkk (2016), naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi karena inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, nilai utang piutang antar negara, tingkat bunga, tabungan domestik, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi di Indonesia sangat “sensitif” dan mudah sekali naik. Jika tingkat inflasi menembus level 2 digit, maka seperti yang dikatakan di atas, akan sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang mendukung perekonomian. Untuk itu, pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia, senantiasa berusaha menekan tingkat inflasi.

Tabel 1. 1 Perbandingan Inflasi Target dan Inflasi Aktual Tahun 2001-2018

Year	Inflation Target	Inflation Actual (% , yoy)
2005	6 ±1%	17,11
2006	8 ±1%	6,6
2007	6 ±1%	6,59
2008	5 ±1%	11,06
2009	4,5 ±1%	2,78
2010	5±1%	6,96
2011	5±1%	3,79
2012	4.5±1%	4,3
2013	4.5±1%	8,38
2014	4.5±1%	8,36
2015	4±1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017*	4±1%	
2018*	3,5±1%	

Sumber : *Bank Indonesia*

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat inflasi Indonesia dalam tiga belas tahun terakhir

kuatif. Diawali pada tahun 2005 inflasi berada pada posisi yang cukup atinkan yaitu 17,1% yang terutama dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh



faktor eksternal. Pada tahun 2006 inflasi jauh membaik bahkan berada di bawah target yaitu turun menjadi 6,6%. Tahun 2007 inflasi jauh lebih stabil yaitu berada pada angka 6,6%. Namun setelah itu, di tahun 2008 inflasi melesat naik cukup tinggi mencapai dua digit yaitu sebesar 11,06% dan kemudian turun drastis di tahun 2009 yaitu mencapai 2,78%. Setelah itu tahun 2010 kembali naik cukup tinggi di angka 6,96%, lalu turun lagi di tahun 2011 yaitu 3,79% dan naik sedikit di tahun 2012 yaitu 4,3%. Di tahun 2013 dan 2014 inflasi kembali naik di angka 8,38 dan 8,36%.

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, inflasi di Indonesia hingga tahun 2018 sebenarnya cukup terkendali. Jika dilihat, tidak banyak inflasi aktual yang meleset dari target yang ditentukan. Namun jika dicermati, terdapat 4 tahun dimana inflasi aktual melebihi target yang ditetapkan. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, selama 13 tahun ternyata masih ada 30,76% inflasi yang meleset dari target. Hal ini cukup menjadi masalah mengingat angkanya masih tergolong besar sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Inflasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor dapat berupa penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Faktor eksternal tentu berasal dari kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi secara global. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luar sebab Indonesia merupakan negara *small open economy*. Adapun *small open economy* merupakan karakteristik suatu negara yang merupakan bagian kecil dari pasar dunia, sehingga pengaruhnya terhadap pasar dunia juga kecil. Konsekuensi yang ditimbulkan sebagai negara *small open economy* adalah stabilitas perekonomian domestik akan rawan terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh perekonomian dunia.



Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi secara internal adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter yaitu diantaranya jumlah uang beredar, nilai tukar dan suku bunga. Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki fokus pada pencapaian dan pemeliharaan nilai mata uang rupiah yang salah satunya tercermin dari inflasi. Kemudian, menurut UU No. 3 tahun 2004, inflasi merupakan satu-satunya tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Setelah adanya krisis 1998, otoritas moneter mulai memikirkan strategi kebijakan dalam rangka pengendalian moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.

Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah agar perekonomian negara dapat dikendalikan melalui pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional.

Hingga saat ini, upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia masih terkendala karena harga masih bersifat fluktuatif sehingga dapat menimbulkan inflasi. Jika suatu negara ingin mempertahankan laju inflasi yang rendah, tentunya pemerintah harus menekan kenaikan harga. Usaha untuk menekan harga ini dapat dilakukan salah satunya dengan menekan laju kenaikan jumlah uang beredar.

Uang mempunyai peran sentral di dalam perekonomian modern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2011), uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak maka akan menimbulkan banyak permintaan, dan sebaliknya jika uang yang dipegang oleh masyarakat terlalu sedikit mengakibatkan

pernyataan permintaan dalam masyarakat yang mengakibatkan rendahnya produksi sehingga bisa menimbulkan resesi ekonomi.



Jumlah uang beredar adalah salah satu variabel moneter yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan permintaan uang. Jumlah uang beredar di Indonesia terus mengalami peningkatan. Melihat fakta ini, maka stabilitas uang yang beredar perlu dijaga karena berdampak pada stabilitas ekonomi.

Dalam perekonomian terbuka, kestabilan tingkat harga dapat dilihat dari nilai tukar suatu mata uang. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Ketika nilai rupiah meningkat cukup tinggi mengakibatkan melambungnya harga barang-barang terutama barang-barang impor atau bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Situasi demikian menyebabkan meningkatnya laju inflasi, dan apabila situasi ini terjadi terus-menerus dan semakin hari harga barang terus meningkat, maka akan menyebabkan laju inflasi yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Fluktuasi tingkat suku bunga juga mempunyai implikasi yang penting terhadap sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Tingkat bunga yang tinggi akan menjadi masalah yang menyulitkan bagi investasi di sektor riil. Tapi tingkat bunga yang tinggi akan merangsang lebih banyak tabungan masyarakat. Untuk itulah tingkat fluktuasi bunga harus senantiasa terkontrol agar tetap mendorong kegiatan investasi dan produksi serta tidak mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung dan tidak mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri (Mahendra, 2016).

Cara lain untuk mengendalikan inflasi adalah melalui belanja pemerintah.

Belanja pemerintah sendiri dilakukan dengan menggunakan uang dan sumberdaya

negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.



Belanja pemerintah seluruh kabupaten/kota di Indonesia terus meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2018. Melihat fakta ini, pemerintah harus bertindak mengontrol pengeluaran karena jika pengeluaran terus meningkat akan berdampak pada inflasi melalui permintaan terhadap barang dan jasa.

Faktor eksternal yang mempengaruhi inflasi suatu negara salah satunya adalah harga minyak dunia. Arifin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, mengatakan bahwa minyak merupakan salah satu sumber energi strategis yang menjamin perkembangan industri modern dan ekonomi. Harga minyak selalu dianggap sebagai barometer ekonomi di seluruh dunia, karena minyak merupakan salah satu energi utama yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Minyak menjadi sumber energi teratas yang digunakan untuk menopang proses produksi dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

Fluktuasi harga minyak yang sangat tinggi menjadi perhatian hampir seluruh negara di dunia, baik negara produsen (eksportir) minyak bumi maupun konsumen (importir). Pasokan minyak bumi merupakan *input* vital dalam proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik, menjalankan mesin produksi dan mengangkut hasil produksi ke pasar. Jika harga minyak mentah dunia meningkat, maka harga BBM dalam negeri pun ikut meningkat sehingga akhirnya akan menimbulkan peningkatan inflasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya inflasi sudah menjadi masalah perekonomian di Indonesia sejak lama dimana fenomena inflasi ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi. Sehingga

bertarik meneliti mengenai masalah inflasi di Indonesia dengan judul



“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2005 - 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, dan BI Rate, belanja pemerintah, serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, BI Rate, belanja pemerintah, serta faktor eksternal harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat dengan harapan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Penulis dan pembaca, agar menambah pengetahuan dan wawasan mengenai inflasi secara umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
2. Akademik, agar dapat dijadikan referensi atau literatur selanjutnya dengan pokok bahasan yang sama, yaitu mengenai inflasi



3. Pemerintah, otoritas moneter, atau stakeholder terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai inflasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Konsep Inflasi

Terdapat banyak pengertian inflasi dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Keanekaragaman pengertian ini disebabkan oleh pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Menurut Mankiw (2006) inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Kemudian, Boediono (2009) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Sementara itu, menurut Case dan Fair (2007), inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terdapat aspek-aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu : (1) *Tendency* atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat; (2) *Sustained*. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama; (3) *General Level of Prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya satu macam barang saja.

Selain Inflasi (*Inflation*), perlu juga dipahami Tingkat Inflasi (*Inflation Rate*) dan Indeks Harga (*Price Index*). Jika inflasi adalah tingkat perubahan harga itu

haka tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi terdahulu atau persentase
n dalam tingkat harga, sedangkan Indeks Harga mengukur biaya dari



sekelompok barang tertentu sebagai persentasi dari kelompok yang sama pada periode dasar (*base period*).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu : (1) Kelompok Bahan Makanan; (2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; (3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4) Kelompok Sandang; (5) Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; (6) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi Inflasi Inti dan Inflasi non inti. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam

an inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti : interaksi an-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi



internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Inflasi non Inti adalah komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental.

Komponen inflasi non inti terdiri dari : (1) Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*), yaitu dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional; (2) Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*), yaitu Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain lain.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor-faktor ini berasal dari dalam negeri (internal).

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan

ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku



pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Terdapat tiga kelompok teori mengenai inflasi yang membahas tentang aspek-aspek tertentu, tiga teori tersebut yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Dalam teori kuantitas, inflasi hanya biasa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral, dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya.

Pada teori Keynes, terdapat kelompok sosial yang cenderung menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat (*inflationary gap*). Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah. Hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga. Proses inflasi akan terus berlanjut selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan. Inflasi ini akan berhenti jika permintaan al tidak melebihi harga-harga yang berlaku.



Selanjutnya teori strukturalis atau yang biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur pertumbuhan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

2.1.2. Konsep Jumlah Uang Beredar

Pengertian uang beredar seperti yang dikutip dalam bi.go.id adalah jumlah uang yang beredar dalam sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat



dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. M1 atau biasa disebut dengan *narrow money* meliputi uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah atau demand deposit (DD)). M2 atau biasa disebut *board money* meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga atau *time deposit* (TD) atau *saving deposit* (SD) yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Definisi uang beredar lebih luas lagi disimbolkan dengan M3, yang mencakup SD dan TD, mata uang domestik atau mata uang asing penduduk negara yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga-lembaga keuangan. Semua TD dan SD ini disebut uang kuasi atau *quasy money* (QM). TD dan SD dalam mata uang asing yang bukan merupakan milik penduduk yang bersangkutan tidak termasuk dalam definisi uang kuasi.

Melanjutkan yang dikutip bi.go.id, faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Assets / NFA) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net Domestic Assets / NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / NCG) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemerintah

lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam pinjaman yang diberikan.



2.1.3. Konsep Nilai Tukar

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004), nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mulai muncul sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar penduduk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Penggunaan mata uang penduduk negara lain dilakukan pada saat penduduk suatu negara melakukan pembelian barang atau jasa dari negara lain. Sementara di sisi negara penjual akan menerima mata uang yang diterima dari negara pembeli tersebut, baik dalam bentuk mata uang negara bersangkutan atau mata uang negara lainnya yang sudah disepakati sebagai mata uang internasional. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang antarnegara yang melakukan transaksi perdagangan.

Dalam konsep nilai tukar, dikenal istilah apresiasi dan depresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing maka definisinya adalah $NT_{IDR/USD} = \text{Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)}$. Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang

sebut devaluasi.



Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi.

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah maka $NT_{USD/IDR} = \text{dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah}$. Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami depresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap.

Dengan contoh di atas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar $1/8.500 \text{ USD}$ atau $0,00012 \text{ USD}$. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh di atas sebesar $1/9000 \text{ USD}$ atau $0,00011$, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh $1/8.000 \text{ USD} = 0,00013 \text{ USD}$.

Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), dan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*). Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai

ng ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat



dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Bank sentral dapat saja melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau *batas pita intervensi*. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi.

2.1.4. Konsep BI Rate

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, bunga



merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi. Sedangkan, bunga dari sisi permintaan merupakan biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal (Deviana, 2014)

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme BI rate (sukubunga BI) untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi BI rate sendiri menurut Bank Indonesia adalah suku bunga instrumentsinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama.

BI rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga sertifikat bank indonesia 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga sertifikat bank indonesia 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang lebih panjang. Perubahan BI rate (SBI tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin. BI rate ditetapkan oleh dewan gubernur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (1) Rekomendasi BI rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi; (2) Berbagai informasi lainnya seperti indikator makro ekonomi, survei, pendapat ahli, hasil-hasil riset ekonomi.

Berdasarkan kutipan bi.go.id, Bank Indonesia melakukan penguatan

operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau
ga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku



efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day *Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

2.1.5. Konsep Belanja Pemerintah

Kebijakan alokasi anggaran belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara berbagai pilar kebijakan

nya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah negara, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (*direct budget intervention*) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

Pengeluaran atau belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Teori mengenai belanja pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi : a. Belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; b. Belanja pemerintah untuk gaji pegawai; c. Belanja pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan belanja pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Terkait dengan perkembangan belanja pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : a. Perubahan permintaan akan barang publik; b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam



menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; c. Perubahan kualitas barang publik; d. Perubahan harga faktor produksi.

2.1.6. Konsep Harga Minyak Dunia

Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sementara kebutuhan akan minyak bumi terus meningkat. Hal ini disebabkan karena minyak bumi juga digunakan untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Terbatasnya ketersediaan minyak bumi menyebabkan kapasitasnya semakin hari semakin berkurang. Jika konsumsi terhadap minyak terus-menerus meningkat tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak yang ada, maka akan terjadilah kelangkaan sumber daya minyak. Dampak yang telah terjadi dari ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak saat ini salah satunya adalah kenaikan harga minyak yang berfluktuatif.

Harga dapat didefinisikan sebagai suatu penetapan nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk. Harga minyak dunia adalah harga atau sejumlah nilai moneter yang terbentuk karena permintaan dan penawaran komoditas minyak dunia.

Terdapat tiga jenis minyak yang paling sering diperdagangkan di dunia, yaitu : Minyak *West Texas Intermediate* (WTI) untuk daerah Amerika, Minyak *Brent* untuk daerah Eropa, dan Minyak Dubai untuk kawasan Timur Tengah. Penentuan harga minyak dilihat dari besarnya derajat API (*American Petroleum Institute*) dan kadar belerangnya.

Eluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya di aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingkat yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan



penawaran (*demand and supply mechanism*) sebagai faktor fundamental. Sedangkan faktor lain yang dianggap sebagai faktor non-fundamental, terutama berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik dan spekulasi (Nizar, 2012). Dikutip dari Fauzannissa (2016) harga minyak dunia dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah faktor fundamental, yang terdiri atas permintaan minyak, pasokan minyak, stok minyak, kapasitas produksi cadangan dunia dan kemampuan kilang dunia. Faktor kedua adalah faktor non fundamental, yang terdiri dari geopolitik, kebijakan pemerintah, cuaca, bencana alam, pemogokan, kerusakan instalasi ranai produksi, pelemahan nilai dollar dan spekulasi. Faktor ketiga adalah pengaruh dari kebijaksanaan pasokan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*).

Kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah (*windfall profit*). Namun, pada saat bersamaan akan menyebabkan membengkaknya beban subsidi pemerintah. Lebih jauh lagi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat harga domestik.

2.2. Hubungan Teori Antar Variabel

2.2.1 Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi

Hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini dikemukakan oleh kaum moneteris yang berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi akibat peningkatan jumlah uang beredar. Tingkat harga yang berlaku (P) akan berubah sejalan dengan perubahan uang yang beredar, dengan asumsi bahwa *velocity of money* (V) dan

income (Y) akan dianggap *given* atau *ceteris paribus*



(Mankiw, 2007). Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dalam persamaan yang disebut persamaan kuantitas di bawah ini :

$$M \times V = P \times Y$$

Dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah *velocity of money*, P adalah harga dan Y adalah *national income*.

Nilai uang ditentukan oleh *supply* dan *demand* terhadap uang. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, sementara jumlah uang yang diminta (*money demand*) ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah uang yang diminta.

Peningkatan harga kemudian mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat. Pada akhirnya, perekonomian akan mencapai ekuilibrium baru, saat jumlah uang yang diminta kembali seimbang dengan jumlah uang yang diedarkan. Penjelasan yang menggambarkan bagaimana tingkat harga ditentukan dan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar disebut teori kuantitas uang (*quantity theory of money*). Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi.

Menurut Mankiw (2006), negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi sedangkan negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas bahwa kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.



2.2.2 Nilai Tukar terhadap Inflasi

Teori yang menerangkan hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi adalah teori paritas daya beli (*purchasing power parity-PPP*). Teori ini mengatakan bahwa nilai tukar akan berada dalam keseimbangan atau berlaku sesuai dengan yang diharapkan apabila nilai tukar tersebut mencerminkan adanya angka perbandingan antara nilai suatu mata uang dengan nilai mata uang negara lain yang ditentukan oleh daya belinya masing-masing (Atmadjaja, 2013).

Penjelasan konsep teori Purchasing Power Parity didasarkan pada hukum satu harga atau *the law of one price* yang menyatakan bahwa harga komoditas yang sama di dua negara yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Hubungan dalam bentuk Paritas Tingkat Bunga biasanya berlaku di negara berkembang, yang mata uangnya tergolong lunak (*soft currency*). Maksudnya adalah mata uang yang cenderung melemah terhadap mata uang lain.

Menurut Madura (2009), keseimbangan nilai tukar akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi diantara dua negara. Hal ini mengakibatkan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Dengan kata lain, jika harga meningkat (inflasi) maka mata uang domestik mengalami depresiasi, dengan asumsi bahwa harga di luar negeri (*foreign price*) ceteris paribus. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu daya beli domestik mengalami kenaikan (harga turun /terjadi deflasi) maka akan diikuti pula oleh apresiasi pada mata uang domestik. Depresiasi berarti harga rupiah terhadap mata uang asing meningkat, sedangkan apresiasi berarti harga rupiah terhadap mata

ng menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa
r mempunyai hubungan yang positif terhadap inflasi.



Melemahnya nilai tukar rupiah menjadikan harga barang-barang impor meningkat dikarenakan dibutuhkan jumlah rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan barang-barang impor tersebut, demikian pula halnya dengan barang-barang dengan bahan baku produksi yang diimpor. Hal ini juga akan menaikkan harga produksi dalam negeri yang dapat berujung pada terjadinya inflasi. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga mengakibatkan meningkatnya nilai ekspor. Harga barang domestik yang lebih murah menarik minat pihak luar negeri untuk menambah jumlah permintaan akan barangnya sehingga perlahan-lahan harga akan naik dan menyebabkan inflasi (Sipayung dan Budhi, 2013).

2.2.3 BI Rate terhadap Inflasi

Teori suku bunga klasik adalah teori yang dapat menjelaskan hubungan antara suku bunga (BI Rate) dan inflasi. Menurut Teori Klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan dan tingkat suku bunga adalah faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada dana investasi yang bersumber dari tabungan. Secara lebih rinci, suku bunga berperan sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, dan alat penyelesaian hubungan hutang-piutang yang menyangkut masa depan.

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan *full employment*. Dalam keadaan *full employment*, seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi kecuali meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan.



Konsep tabungan menurut klasik adalah seorang dapat melakukan tiga hal terhadap selisih antara pendapatan dan pengeluaran konsumsinya yaitu: pertama, ditambahkan pada saldo tunai yang ditahannya. Kedua, dibeli obligasi baru dan ketiga, sebagai pengusaha, dibeli langsung kepada barang-barang modal. Asumsi yang digunakan disini adalah bahwa penabung yang rasional tidak akan menempuh jalan yang pertama. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa akumulasi kekayaan dalam bentuk uang tunai adalah tidak menghasilkan.

Menurut teori klasik, tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat.

Perubahan berupa peningkatan level BI Rate bertujuan untuk mengurangi laju aktivitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan

inya mengurangi tekanan inflasi.



Sebaliknya, pada saat level BI Rate turun maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga deposito turun, keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank akan menurun. Kondisi ini memicu peningkatan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan meningkatkan transaksi masyarakat. Pada suku bunga kredit, penurunan suku bunga akan merangsang peningkatan permintaan kredit dari pelaku usaha karena murahnya biaya modal. Pada kondisi ini maka keadaan ekonomi yang lesu akan segera meningkat. Adanya tambahan likuiditas yang ada di masyarakat untuk bertransaksi akan diimbangi oleh peningkatan produksi di sisi pelaku usaha maka pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan ekonomi. (Yodiatmaja, 2012)

Menurut Hudaya (2011), hubungan antara BI rate dengan inflasi adalah kenaikan BI rate akan mendorong kenaikan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Demikian juga halnya dengan suku bunga jangka panjang. Produsen akan merespon kenaikan suku bunga di pasar uang dengan mengurangi investasinya, maka produksi dalam negeri (*output*) menurun sehingga tingkat inflasi domestik menurun.

2.2.4 Belanja Pemerintah terhadap Inflasi

Teori ekonomi Keynesian adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik

global keluar dari depresi.



Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori “sisi permintaan”.

Belanja pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi pemerintah (I), dan belanja pemerintah akan barang dan jasa (G). Dari persamaan keseimbangan perekonomian dalam tiga sektor ini dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan belanja pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposabel. Pendapatan disposabel merupakan pendapatan yang digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sector pendapatan telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan pendapatan rumah

Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi



kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung (Sukirno, 2006). Pajak yang lebih tinggi ini akan mengurangi keuntungan dari produsen dan berimbas pada harga. Dampaknya adalah penawaran agregat turun (karena penurunan insentif swasta), sementara permintaan agregat meningkat (karena teknik pembiayaan yang inflasioner) dan pada akhirnya mengakibatkan inflasi.

Teori ekonomi neoklasikal juga dapat menjelaskan hubungan belanja pemerintah dan inflasi dalam jangka panjang. Teori ini memandang bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Ekonom neoklasik menggunakan konsep ekuilibrium dalam menjelaskan berjalannya perekonomian.

Ekonomi neoklasik berpendapat pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah tidak seharusnya mengintervensi karena hanya akan membuat pasar tidak efisien. Pemikir Neoklasik mengakui bahwa ekonomi tidak bisa mencapai keseimbangan secara langsung akan tetapi, kaum Neoklasik lebih tidak setuju ketika harus mengabaikan keberadaan mekanisme pasar serta menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Bagi Neoklasik, kelemahan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dapat diatasi oleh pemerintah, dan pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Akan tetapi, batasan campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi ini hanya sebatas memperbaiki distorsi yang berlangsung di pasar dan bukannya malah menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri.

Menurut teori Neoklasik, segala upaya untuk mengintervensi melalui penambahan belanja pemerintah pada akhirnya akan mengakibatkan inflasi.

Berdasarkan teori ini maka dapat dikatakan belanja pemerintah mempunyai

yang positif terhadap inflasi dengan mengasumsikan upah dan harga



Seiring berjalannya waktu, inflasi secara signifikan mengakibatkan pengambilan keputusan pemerintah menjadi rumit. Ketika kebijakan fiskal yang semula sebagai elemen penting dalam mencapai stabilitas harga, ternyata juga dipengaruhi inflasi itu sendiri. Inflasi menaikkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah yang secara simultan dapat menaikkan penerimaan negara, dimana peningkatan fiskal pemerintah memiliki tingkat kecepatan yang berbeda.

2.2.5 Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi

Hubungan antara harga minyak dunia terhadap inflasi dapat kita lihat melalui teori yang dikemukakan oleh Blanchard. Menurut Blanchard, mekanisme transmisi dampak *oil price shock* terhadap harga dan inflasi dapat dijelaskan melalui model *mark-up*. Ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia maka perusahaan akan merespon dengan menaikkan markup sehingga harga akan naik, karena hubungan antara keduanya berbanding lurus. Dengan asumsi upah tetap, peningkatan harga minyak akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga.

Meningkatnya harga minyak menyebabkan meningkatnya inflasi. Harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen (Cognigni dan Manera, 2008). Karena ada upaya mensubstitusi minyak dengan energi bentuk lain, harga sumber energi alternatif juga akan meningkat. Disamping efek langsung terhadap inflasi, terdapat efek tidak langsung berkaitan dengan

perusahaan dan perilaku pekerja (*second round effect*). Perusahaan akan meningkatkan biaya produksi dalam bentuk harga konsumen yang



lebih tinggi untuk barang-barang atau jasa non-energi, sementara pekerja akan merespon peningkatan biaya hidup dengan menuntut upah yang lebih tinggi.

Tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, konsumsi minyak yang tinggi diperkirakan akan menyebabkan inflasi. Inflasi ini termasuk *demand pull inflation* yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan menarik (*pull*) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi *excess demand*, yang merupakan *inflationary gap*. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi *full-employment*.

Kenaikan harga minyak dunia dapat memicu terjadinya inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) merupakan salah satu jenis inflasi menurut asalnya yaitu *imported inflation*. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*). Inflasi ini dapat 'menular' baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor.

Inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu jenis inflasi, tetapi seringkali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor-faktor ekonomi maupun selaku ekonomi yang benar-benar memiliki hubungan yang independen atau sistem perekonomian negara. Sebagai contoh, *imported*



inflation seringkali diikuti oleh *cost push inflation*, *domestik inflation* diikuti dengan *demand pull inflation*, dsb.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan variabel-variabel moneter terhadap inflasi sebelumnya dilakukan oleh Amrini dkk (2014) dengan judul Analisis Kebijakan Moneter terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar, jumlah uang beredar periode sebelumnya, suku bunga SBI, kurs, dan perekonomian secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan positif terhadap inflasi di Indonesia.

Watulingas dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia (Periode Tahun 2000 – 2014) menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika jumlah uang beredar meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Lalu, belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika terjadi peningkatan belanja pemerintah maka akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Kemudian pajak berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika terjadi peningkatan penerimaan pajak ditahun sebelumnya maka akan mengakibatkan penurunan nilai inflasi.

Menurut Agusmianata dkk (2017), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Belanja pemerintah terhadap

Indonesia dikatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Pengaruh ini



disebabkan oleh *demand pull inflation*. Permintaan barang terlalu kuat disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang meningkat, dengan meningkatnya pendapatan jumlah uang beredarpun terlalu banyak beredar di masyarakat sehingga masyarakat dengan mudahnya untuk berbelanja barang-barang dan permintaan barang-barangpun meningkat dan terjadilah inflasi. Lalu, tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter cenderung mengikuti pergerakan inflasi. Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil belanja pemerintah. Pendapatan disposibel berkurang yang pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat juga akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan harga-harga barang tidak naik lagi sehingga demand pull inflation dapat dikendalikan dan inflasi akan turun.

Deviana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2006 – 2012 mengatakan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap variabel inflasi, variabel suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap inflasi, variabel nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap inflasi. Pada uji statistik F menunjukkan bahwa semua variabel independen suku bunga SBI, suku bunga kredit dan nilai tukar secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen Inflasi. Pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI, suku bunga kredit berpengaruh terhadap inflasi sementara nilai tukar tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Sipayung dan Budhi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh

Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode

2006 – 2012 menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar



rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1993-2012. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh sedangkan nilai tukar secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia untuk periode 1993-2012. Variabel nilai tukar diketahui sebagai variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1993-2012 jika dibandingkan dengan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah uang beredar.

Yuliandari dan Hariyanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Tingkat Inflasi di ASEAN-5 menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial yang dilakukan, untuk negara Indonesia, variabel JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, variabel kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Rangkuman hasil penelitian untuk 5 negara di ASEAN adalah dari semua variabel yang diteliti, hanya variabel suku bunga yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di kelima negara ASEAN. Variabel jumlah uang beredar hanya negara Indonesia saja yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi, kurs hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap inflasi di negara Filipina. Dan untuk variabel GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di negara Indonesia dan Philipina.

Mahendra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di

a mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji F dan uji parsial, variabel



jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan dan secara nyata terhadap inflasi.

Utami dan Soebagiyo (2013) juga melakukan penelitian yang berjudul Penentu Inflasi di Indonesia; Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, atautkah Cadangan Devisa?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Cadangan Devisa secara serempak mempengaruhi Inflasi di Indonesia pada tahun 2007-2013. Hasil regresi dari penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, Nilai Tukar berpengaruh positif signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Cadangan devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia dan Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2007- 2013.

Kalalo dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia periode 2000-2014 menyatakan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar secara nyata tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Ketika Jumlah Uang Beredar meningkat ternyata tidak serta merta diikuti oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa sehingga tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini membuat kecenderungan masyarakat lebih suka memegang uang daripada membelanjakannya. Variabel Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Ketika Harga Minyak Dunia naik pemerintah langsung merespons dengan mengeluarkan kebijakan fiskal seperti harga, pendapatan, dan perpajakan guna menjaga inflasi di Indonesia. Variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika mampu di

oleh Pemerintah dengan mengucurkan cadangan devisa yang dimiliki menutupi selisih dari biaya perdagangan.



Variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dengan tingginya tingkat suku bunga dapat menurunkan sifat konsumtif masyarakat dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang beredar berkurang di masyarakat dan kenaikan harga dapat diatasi.

Rahmawati dan Wahyu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Jumlah Uang Beredar terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2006.1-2015.1 (Error Correction Model) menyatakan bahwa hanya variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan variabel jumlah uang beredar hanya berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek.

Halim dkk (2015) melakukan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia, Harga Emas, JUB, dan Kurs terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001.1-2013.12. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh indikator harga minyak mentah dunia terhadap inflasi di Indonesia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, hasil tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa harga minyak mentah dunia berhubungan positif terhadap inflasi. Harga emas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa apabila inflasi naik maka besarnya tingkat pengembalian saham akan menurun begitu pula sebaliknya. Tingkat saham disini berhubungan dengan harga emas. JUB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi, hasil tersebut karena nilai uang kuasi yang tidak likuid sehingga walaupun nilainya tinggi tapi tidak cukup untuk mempengaruhi peningkatan inflasi

esia. Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, hasil mengindikasikan bahwa terjadi penguatan nilai mata uang rupiah sesuai



teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yaitu rupiah menguat karena kestabilan atau rendahnya inflasi.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas pengaruh variabel-variabel moneter terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Secara umum, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang jika mengalami kenaikan dan tidak dapat dikontrol maka akan berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Inflasi dapat diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi dari dalam negeri adalah melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter, dalam hal ini, Bank Indonesia, untuk mencapai stabilitas harga. Melalui kebijakan ini, inflasi dapat dipengaruhi dari sisi permintaan dan ekspektasi masyarakat melalui beberapa variabel yaitu diantaranya jumlah uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga SBI.

Jumlah uang beredar (M2) merupakan salah satu variabel yang menyebabkan inflasi. Perubahan jumlah uang beredar akan mengakibatkan perubahan harga secara proporsional. Artinya kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.

Nilai tukar juga merupakan salah satu variabel yang menyebabkan inflasi. Apabila nilai tukar melemah akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa naik secara terus menerus maka akan menyebabkan



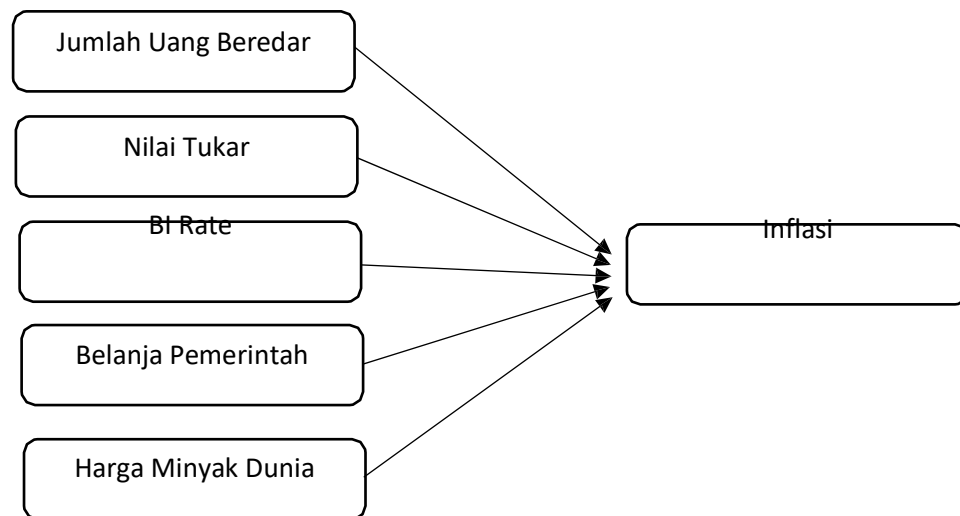
Dalam kerangka kebijakan moneter di Indonesia, BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat. BI Rate inilah yang kemudian akan diatur besarnya untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan rendah. Mekanisme bekerjanya BI Rate hingga mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter yang berupa inflasi disebut sebagai mekanisme kebijakan moneter.

Dari segi variabel fiskal, salah satu yang mempengaruhi inflasi adalah belanja pemerintah. Untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga, pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran.

Harga minyak dunia merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi inflasi. Jika harga minyak dunia mengalami peningkatan maka harga minyak domestik khususnya negara yang mengimpor minyak akan naik. Sementara itu minyak sangat dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jika harga minyak naik maka harga barang dan jasa pun akan naik dan akan menyebabkan peningkatan inflasi.

Berdasarkan alur penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian pada Gambar 2.4 seperti berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, maka dapat disusun hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. Faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, belanja pemerintah serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia periode tahun 2005-2018.
2. Faktor internal yaitu BI Rate berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia periode tahun 2005-2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan mengambil 4 (tiga) variabel yang merupakan faktor internal penyebab inflasi yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar dan BI Rate, belanja pemerintah, serta harga minyak dunia. Adapun cakupan wilayahnya adalah negara Indonesia. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2005-2018”.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan data tahunan selama periode 2005 - 2018. Data-data tersebut berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu inflasi, faktor internal (jumlah uang beredar, nilai tukar, BI rate, belanja pemerintah), serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia. Sementara itu sumber data penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *International Monetary Fund*, *World Bank*, *Energy Information Administration*, buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun sumber lain.

3.3. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini akan mengamati pengaruh jumlah uang beredar (M2), nilai Rate, belanja pemerintah, dan harga minyak dunia terhadap Inflasi. yang digunakan adalah Model OLS (*Ordinary Least Square*). *Ordinary*



Least Square merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Metode ini digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataannya. Bentuk persamaanya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) \dots \dots \dots (1)$$

Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam persamaan non linear sebab data-data yang digunakan pada penelitian ini memiliki satuan yang berbeda, sehingga persamaanya menjadi sebagai berikut :

$$Y^{\beta_1} = \beta_0^{\beta_1} \beta_2^{\beta_1} \beta_4^{\beta_1} \beta_5^{\beta_1} \beta_3^{\beta_1} Y^{\beta_1} + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi linear dengan spesifikasi model sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \beta_1 + \beta_2 \ln \beta_2 + \beta_3 \beta_3 + \beta_4 \ln \beta_4 + \beta_5 \ln \beta_5 + \mu \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

β_0 = Inflasi

β_1 = intercept / konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

β_1 = Jumlah Uang Beredar (M_2)

β_2 = Nilai Tukar

β_3 = BI Rate

β_4 = Belanja Pemerintah

β_5 = Harga Minyak Dunia



μ = error term

3.3.1. Uji Signifikansi Statistik

Uji signifikansi digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan hipotesis nol yang telah ditentukan. Uji signifikansi ini dilatarbelakangi oleh uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

3.3.1.1. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun dalam proses pengujian, peneliti menguji menggunakan nilai probabilitas (*prob. value*) dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) dimana :

Jika *p-value* > α , maka H_0 diterima dan H_a

ditolak. Jika *p-value* < α , maka H_0 ditolak dan

H_a diterima.

3.3.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji statistic yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Adapun dalam proses pengujian, peneliti juga menggunakan nilai probabilitas (*prob. value*) dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$)



ue > α , maka H_0 diterima dan H_a

ika *p-value* < α , maka H_0 ditolak dan

erima

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi sebagai variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen jumlah uang beredar, nilai tukar, bi rate, belanja pemerintah, serta harga minyak dunia.

Definisi operasional adalah definisi variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga variabel tersebut bersifat spesifik dan terukur.

1. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia dari tahun 2005 – 2018 dan menggunakan satuan persen (%).
2. Jumlah uang beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah uang beredar dalam arti luas atau M2. M2 meliputi M1 (uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral), uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dari tahun 2005 – 2018. Diukur dalam satuan miliar rupiah.
3. Nilai Tukar yang dimaksud ialah perbandingan nilai rupiah dengan dolar Amerika Serikat di akhir periode selama tahun 2005 sampai 2018.
4. BI Rate yang dimaksud adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai sasaran operasional kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah BI rate dalam satuan persen periode 2005 – 2018.



5. Belanja pemerintah yang dimaksud adalah total pengeluaran atau belanja modal pemerintah negara Indonesia dihitung dalam satuan triliun rupiah dari tahun 2005-2018.
6. Harga minyak dunia adalah harga yang ditetapkan untuk mendapatkan 1 barel minyak dalam dollar Amerika Serikat. Data yang digunakan adalah harga spot minyak mentah *West Texas Intermediate* selama dari tahun 2005-2018.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian

4.1.1 Perkembangan Inflasi

Laju inflasi di Indonesia telah mengalami dinamika dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Laju inflasi yang tercatat secara teratur dalam berbagai terbitan sejak proklamasi kemerdekaan adalah sejak tahun 1953. Perhitungan dan pencatatan laju inflasi tersebut dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau yang sekarang dikenal sebagai Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS (Suseno dan Astiyah, 2009)

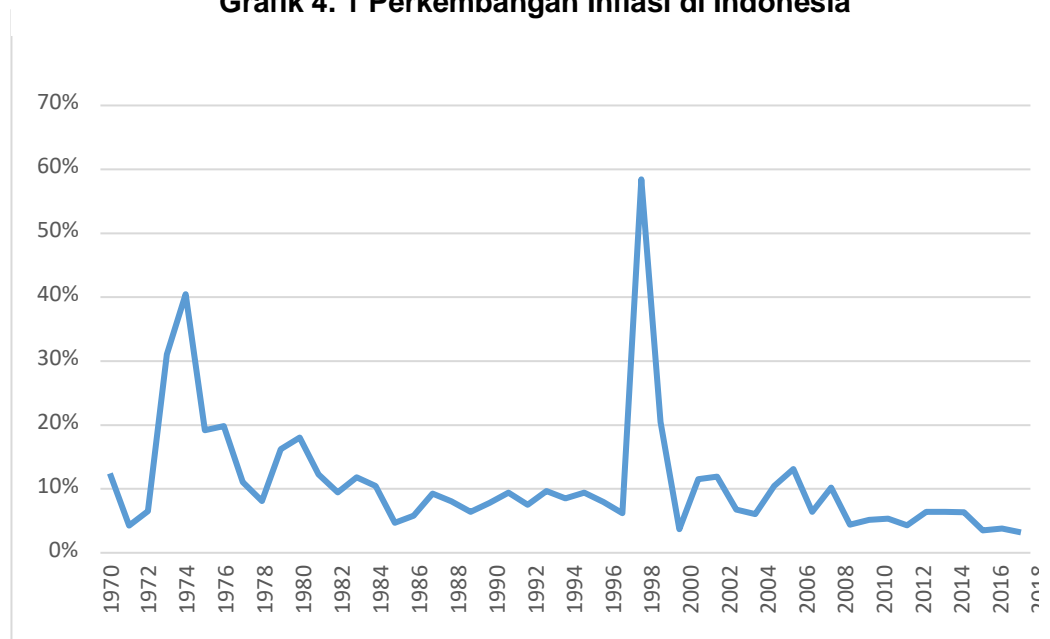
Inflasi dihitung berdasarkan suatu angka indeks, yang dikenal sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka indeks ini disusun berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS. Survei tersebut pada awalnya hanya menyangkut harga bahan makanan dan dilakukan pada wilayah yang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perekonomian serta kegiatan masyarakat, angka indeks tersebut terus mengalami perbaikan, baik dalam hal jenis barang yang dipergunakan maupun cakupan wilayah yang disurvei untuk menghitung perubahan biaya hidup tersebut.

Perkembangan jumlah atau jenis barang dan cakupan wilayah yang disurvei sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mencerminkan tingkat dan variasi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Perkembangan jumlah atau jenis barang serta cakupan wilayah atau daerah untuk perhitungan IHK dari tahun 1953 sampai



dengan 2007 telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kurun waktu yang bersangkutan.

Grafik 4. 1 Perkembangan Inflasi di Indonesia



Sumber : World Bank

Sejak tahun 1968, kebijakan stabilisasi ekonomi telah dijalankan untuk menurunkan tingkat harga. Kebijakan tersebut cukup memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, perkembangan tersebut mengalami gangguan pada akhir tahun 1972 yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang tinggi yaitu 25,7%. Kenaikan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan indeks bahan makanan, khususnya indeks harga beras yang naik 88% karena panen yang kurang baik sebagai akibat musim kemarau yang panjang.

Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 1973 dan 1974. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu meningkatnya harga minyak di pasar dunia. Karena harga minyak meningkat, penerimaan pemerintah pun meningkat sehingga berakibat pada peningkatan jumlah uang beredar dan pada gilirannya mendorong kenaikan

harga. Untuk mengurangi tekanan inflasi ini, pemerintah melakukan stabilisasi pada April 1974. Kebijakan yang



ditempuh adalah kebijakan kredit selektif. Tujuan dari kebijakan ini yaitu menyerap ekspansi moneter akibat meningkatnya penerimaan pemerintah dari kenaikan harga minyak, agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian.

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan kebijakan devaluasi. Kebijakan ini berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi pada tahun 1983. Di samping itu, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri pada tahun 1984 juga berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi.

Selama tahun 1983 dan 1984, kenaikan harga rata-rata per bulan adalah 1.05%, dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari 1984, yaitu masing-masing sebesar 3,42% dan 1,66% yang erat kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Disamping itu, kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan April dan Juni 1983, yaitu masing-masing sebesar 2,43% dan 1,58%. Kenaikan tersebut terkait erat dengan kebijakan devaluasi rupiah sebesar 27,6% pada Maret 1983. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa selama periode 1970-an sampai dengan 1996/1997 (sebelum krisis finansial Asia), laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun hingga pada tahun 1996 inflasi hanya 6.63%.

Terjadinya krisis finansial di Asia berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Peristiwa itu menyebabkan inflasi meningkat tajam di tahun 1998 sehingga mencapai 77.6% dalam satu tahun. Tingginya laju inflasi terutama berkaitan dengan meningkatnya harga barang yang memiliki kandungan impor tinggi sebagai akibat krisis nilai tukar. Karena tingkat harga yang sudah sangat tinggi pada tahun 1998, maka inflasi pada 1999 menurun tajam menjadi 2.01%. Penurunan inflasi ini selain karena tingkat harga yang sudah tinggi, juga

dikendalikan dari sisi penawaran jangka pendek, yaitu pasokan bahan makanan



yang cukup tersedia oleh pemerintah, perbaikan produksi sektoral, dan kelancaran distribusi barang-barang akibat membaiknya kondisi keamanan.

Inflasi selama tahun 2000 sampai dengan 2008 mengalami fluktuasi yang pada dasarnya dapat ditekan pada tingkat yang relatif rendah. Akan tetapi inflasi juga mengalami kenaikan yang tinggi pada waktu tertentu. Hal ini karena adanya kenaikan *administered prices*. Selama periode 2000 sampai 2008, *administered prices* seringkali lebih tinggi daripada IHK. Hal ini mengindikasikan bahwa *administered prices* mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap kenaikan inflasi IHK. Misalnya, inflasi pada tahun 2001 (12.55%) lebih tinggi daripada tahun 2000 (9.35%) yang terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga dan tarif sejumlah barang dan jasa, seperti BBM, listrik, air minum, dan rokok, serta menaikkan upah minimum.

Pada tahun 2005 inflasi melonjak hingga 17,1%. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2005, hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh faktor eksternal. Faktor tersebut terutama berasal dari melambungnya harga minyak dunia dan berlanjutnya kondisi moneter ketat global. Respon menaikkan harga BBM domestik guna menjaga kesinambungan fiskal sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia tersebut memberikan tekanan kuat terhadap inflasi 2005. Selain dampak tekanan eksternal tersebut, gangguan pasokan dan distribusi, tingginya ekspektasi inflasi, dan depresiasi nilai tukar rupiah turut memberikan tekanan harga yang semakin meningkat. Inflasi pada tahun 2005 ini jauh di atas sasaran inflasi sebesar 6%+1% atau inflasi IHK 2004 sebesar 6,4%.

Laju inflasi selama 2006 secara berangsur menurun hingga mencapai (yoy) sejalan dengan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini berada di bawah sasaran yang ditetapkan pemerintah yaitu



sebesar $8,0\% \pm 1\%$. Secara keseluruhan menurunnya laju inflasi sepanjang 2006 dipengaruhi perkembangan faktor-faktor baik fundamental maupun nonfundamental. Berdasarkan faktor fundamentalnya, menurunnya inflasi IHK merupakan dampak dari membaiknya ekspektasi inflasi, terjaganya kestabilan nilai tukar, dan rendahnya tekanan inflasi dari kesenjangan output. Adapun berdasarkan faktor nonfundamental, menurunnya tekanan inflasi IHK disebabkan oleh minimalnya kebijakan administered prices dan membaiknya perkembangan inflasi volatile foods meskipun masih relatif tinggi.

Inflasi tahun 2007 tercatat 6,59% dan berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2007 yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar $6,0\% \pm 1\%$. Tingkat inflasi yang lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar yang terjaga stabil, ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup serta *administered price* yang hanya meningkat dalam jumlah yang kecil. Selain itu, pemerintah juga mampu mengendalikan factor-faktor yang mempengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas internasional. Kondisi ini selanjutnya meningkatkan kredibilitas kebijakan sehingga memberi kontribusi positif terhadap upaya mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat sejalan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Pada tahun 2008 inflasi kembali naik sebesar 11,06% dikarenakan meningkatnya harga minyak dunia. Hal ini memaksa pemerintah meningkatkan harga BBM, yang kemudian diikuti Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan. Setelah diberlakukannya *Inflation Targeting Framework* (ITF), pada tahun 2013 inflasi kembali naik sebesar 8,38%. Nilai tukar riil mengalami fluktuasi karena sistem nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar fleksibel (*flexible exchange rate*).

n tahun 2015 sampai dengan 2017 inflasi mulai membaik dengan
mi penurunan dikisaran 3%.



Terkendalnya inflasi 2017 disebabkan oleh rendahnya inflasi inti yang tercatat 2,95% (yoy). Bank Indonesia konsisten dalam menjalankan kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Hasilnya inflasi *volatile food* turun dan tercatat 0,71% (yoy). Dampak kenaikan berbagai tarif dalam inflasi *administered prices* yang tercatat 8,70% (yoy) pun dapat dikendalikan. Selain itu, inflasi di taun 2017 juga didukung oleh faktor positif permintaan dan penawaran, rendahnya tekanan dari eksternal, serta koordinasi kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah di pusat maupun daerah.

Inflasi pada 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,5%±1% (yoy). Pada Desember 2018 inflasi tercatat 3,13% (yoy) dan tetap dijaga sebab telah berada dalam kisaran sasarannya dalam empat tahun terakhir. Secara tahunan, inflasi yang terkendali ini dipengaruhi oleh inflasi inti dan inflasi *volatile food* yang terjaga serta inflasi *administered prices* yang lebih rendah. Inflasi inti terjaga pada level rendah sebesar 3,07% (yoy), sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi *volatile food* yang terkendali yaitu sebesar 3,39% (yoy), ditopang oleh pasokan pangan yang terjaga dan pengaruh penurunan harga pangan global. Inflasi *administered prices* tercatat rendah sebesar 3,36% (yoy) sejalan dengan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah.

Perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 1971 sampai dengan 2018 menyiratkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi selama periode tersebut

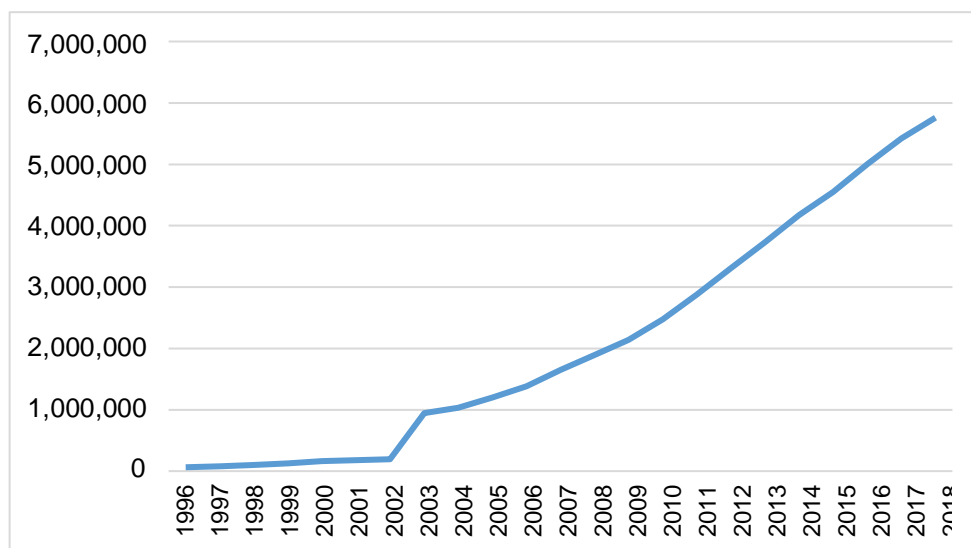
ulu sama.



4.1.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi meningkat, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun ikut bertambah. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, maka tingkat inflasi pun ikut menurun. Jumlah uang beredar adalah jumlah mata uang suatu negara yang diedarkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat, jika jumlah uang beredar bertambah maka tingkat inflasi pun ikut meningkat di suatu negara (Madjid, 2016).

Grafik 4. 2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) Milliar Rupiah



Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan

Menurut Zakinah dan Usman (2010), jumlah uang beredar semakin bertambah banyak jumlahnya setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan uang semakin bertambah. Peningkatan ini disebabkan berbagai hal termasuk tingkat konsumsi masyarakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Perkembangan jumlah uang beredar dari tahun

1996 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2017.

Pertambahannya jumlah uang beredar di masyarakat, konsumsi cenderung meningkat terhadap barang maupun jasa. Hal ini akan menyebabkan naiknya



harga, karena bertambahnya permintaan dari masyarakat, meskipun pertumbuhannya mengalami naik turun.

Pada tahun 2015, posisi jumlah uang beredar (M2) mencapai Rp4.174,2 triliun, atau tumbuh sebesar 14,3% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan setahun sebelumnya yaitu 11,9%. Berdasarkan komponennya, meningkatnya pertumbuhan M2 ini bersumber dari peningkatan pertumbuhan M1 dan uang kuasi. Kemudian berdasarkan faktor yang mempengaruhi, peningkatan M2 ini dipengaruhi oleh operasi keuangan pemerintah pusat dan kenaikan aktiva luar negeri bersih.

Posisi jumlah uang beredar pada tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp5.003,3 triliun. Walaupun meningkat, pertumbuhannya lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun menjadi 10% (yoy). Berdasarkan komponennya, peningkatan pertumbuhan M2 ini bersumber dari peningkatan M1 yang tumbuh 17,3% (yoy) dan surat berharga selain saham yang tumbuh 0,9% (yoy). Selain itu, peningkatan M2 ini juga dipengaruhi oleh ekspansi operasi keuangan pemerintah pusat.

Pada tahun 2017, pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) semakin melambat, yaitu 8,3%, dan posisinya berada pada Rp 5.418,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan seluruh komponen M2, baik uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun uang kuasi. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat.

Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) kembali melambat, dan tercatat Rp5.785,3 triliun atau tumbuh 6,3% (yoy). Hal ini berasal dari komponen uang dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi yang masing-masing tumbuh



sebesar 4,8% (yoy) dan 6,7% (yoy). Pertumbuhan M2 yang melambat ini terutama dipengaruhi oleh penurunan aktiva luar negeri bersih.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama yaitu terdiri dari komponen uang beredar itu sendiri yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. Faktor lainnya yaitu operasi keuangan pemerintah pusat dan aktiva luar negeri.

4.1.3 Perkembangan Nilai Tukar

Kebijakan nilai tukar ditetapkan pada suatu negara dengan tujuan mendukung neraca pembayaran dan juga membentuk efektivitas kebijakan moneter. Jika nilai tukar ditetapkan *overvalue* maka dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri dan barang-barang impor menjadi lebih murah, sehingga neraca perdagangan menjadi memburuk. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi, sehingga dapat tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga tidak tercapai secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan nilai tukar yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara (Simorangkir dan Suseno, 2004).

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap pada tahun 1945. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nilai tukar rupiah sebesar tertentu terhadap mata uang asing atau mata uang lokal lainnya. Namun, tidak lama berselang, stabilitas ekonomi Indonesia terganggu karena perang pada periode

53. Terjadi gangguan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, dan ekonomi lainnya. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang



mengakibatkan pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan inflasi meningkat tajam dan nilai tukar Indonesia dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Pada 7 Maret 1946, pemerintah menerapkan dengan mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12% dari Rp 1,88 per USD menjadi Rp 2,65 per USD.

Nilai tukar terus menerus merosot dan *over valued* karena pembiayaan defisit pemerintah melalui pencetakan uang. Peristiwa ini berakibat pada penurunan ekspor yang menyebabkan penurunan devisa sejak pertengahan tahun 1951. Pemerintah akhirnya kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 sebesar 66,7%, yaitu dari Rp 3,80 menjadi Rp 1,40 per USD. Selanjutnya pada tahun 1957, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang pada pelaku ekonomi tertentu, misalnya hanya pemegang izin impor yang dapat membeli devisa. Tujuan kebijakan tersebut yaitu meningkatkan ekspor, menghidupkan impor dan kegiatan di daerah perkebunan.

Pada periode 1959-1966 perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang lebih berat karena kebijakan pemerintah yang lebih terpusat pada kepentingan politik. Pada periode ini pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi meningkat sangat tinggi, dan investasi menurun sangat tajam. Selain itu, kebijakan devisa sangat ketat sehingga menghambat perdagangan dan lalu lintas modal internasional serta menciptakan pasar gelap dan kegiatan spekulasi valuta asing.

Peristiwa inipun berdampak buruk terhadap nilai tukar rupiah karena mengakibatkan *over valued*. Pemerintah akhirnya melakukan sanering uang pada tahun 1959 dari sisi kebijakan moneter. Nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1000 diturunkan menjadi Rp50 dan Rp100. Selain itu, dari sisi kebijakan nilai tukar,

ah kembali melakukan devaluasi nilai tukar rupiah sebesar 74,7% dari per USD menjadi Rp.45 per USD. Selanjutnya, pada tahun 1965,



pemerintah menerbitkan uang rupiah baru dengan nilai diperkecil, yaitu Rp1000 uang lama sama dengan Rp1 uang baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga dari defisit pengeluaran pemerintah.

Pada tahun 1971, pemerintah memberlakukan sistem devisa bebas dan mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 9,8% dari Rp 378 per USD menjadi Rp 415 per USD. Devaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran melalui perbaikan ekspor. Pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada tahun 1978. Hal ini dilakukan karena laju Inflasi Indonesia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang tetap *over valued*. Nilai tukar didevaluasi sebesar 33,6% dari Rp415 per USD menjadi Rp625 per USD (kebijakan knop 15). Sistem nilai tukar yang digunakan juga diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Secara harian ditetapkan kurs indikasi dan dibiarkan bergerak pada kisaran kurs tertentu. Pemerintah akan melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah yang ditetapkan. Kebijakan Knop 15 tersebut berhasil meningkatkan perolehan devisa hasil ekspor.

Dalam rangka meningkatkan daya saing barang-barang ekspor, pada tahun 1983 nilai tukar kembali didevaluasi sebesar 38,1% dari Rp. 702,50 menjadi Rp 970 per USD. Berlanjut pada tahun 1986, nilai tukar rupiah didevaluasi lagi sebesar 45% dari sebesar Rp1.134 per USD menjadi sebesar Rp1.644 USD. Sistem nilai tukar mengambang terkendali disempurnakan pada tahun 1995 dengan menerapkan penggunaan batas kurs intervensi di samping kurs konversi. Penetapan batas kurs intervensi dimaksudkan sebagai batas bagi bank untuk

atau menjual USD dari Bank Indonesia. Jika kurs rupiah lebih tinggi dari s intervensi, bank dapat membeli USD dari Bank Indonesia. Sebaliknya,



dapat menjual USD kepada Bank Indonesia apabila kurs rupiah lebih rendah dari batas bawah intervensi.

Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar di Thailand dan Indonesia termasuk negara yang terkena dampaknya. Untuk mengurangi terjadinya serangan terhadap nilai tukar Indonesia, Bank Indonesia kemudian menerapkan kebijakan pelebaran rentang intervensi (*spread*) nilai tukar dari 8% menjadi 12% dengan batas bawah Rp2.374 dan batas atas Rp 2.678. Kebijakan ini ditempuh untuk memberi keleluasaan pada pelaku pasar dalam menentukan kurs rupiah dan mengurangi intervensi Bank Indonesia di pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah. Untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing maka transaksi *forward* jual rupiah antara bank dengan nonresiden dibatasi menjadi hanya USD lima juta per nasabah.

Kebijakan-kebijakan terhadap nilai tukar yang telah diterapkan masih tetap tidak mampu meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Penerapan sistem nilai tukar mengambang ini mengakibatkan nilai tukar rupiah semakin lemah. Bahkan hanya dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditetapkan sistem nilai tukar mengambang, rupiah melemah hingga 53,2% dari Rp3.035 per satu USD pada akhir Agustus 1997 menjadi sebesar Rp4.650 pada akhir Desember 1997. Pada akhir Januari 1998 nilai tukar anjlok menjadi Rp10.375. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut terutama disebabkan tingginya arus modal keluar dan peningkatan kegiatan spekulasi terhadap rupiah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan beberapa permasalahan di dalam negeri, seperti kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik.

Pada saat terjadinya kerusuhan Mei 1998, nilai tukar rupiah melemah mencapai Rp10.525 per satu USD dibandingkan dengan kurs bulan



sebelumnya yang hanya sebesar Rp7.970 per satu USD. Krisis nilai tukar dengan disertai gejolak sosial di dalam negeri tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi dan kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada tahun 1998. Namun, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, stabilitas moneter dapat terjaga, serta tidak terdapat gejolak sosial yang berarti, perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2003 cenderung stabil dan menguat.

Mulai tahun 2005 rupiah kembali melemah karena disebabkan beberapa faktor. Tahun 2005 faktor penyebabnya adalah spekulasi global kenaikan bunga dollar AS, inflasi yang meningkat, dan kelebihan likuiditas. Nilai rupiah turun 5,66% menjadi Rp 9.791 per dollar AS. Tahun 2008 rupiah melemah karena krisis *mortgage subprime* Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia, dan inflasi dalam negeri yang tinggi. Nilai rupiah turun 16,86% menjadi Rp 11.005 per dollar AS.

Pada tahun 2013 nilai rupiah turun 25,89% menjadi Rp 12.250 per dollar AS. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca pembayaran, ketidakpastian penyelesaian krisis utang Eropa, likuiditas valas terbatas dan wacana rencana pengurangan stimulus di Amerika. Kemudian pada tahun 2015 rupiah melemah 10,58% menjadi Rp 13.726 per dollar AS. Penyebabnya adalah kelanjutan krisis berkepanjangan di Yunani, pemulihan ekonomi AS, penghentian *quantitative easing* di AS, dan dinamika politik di masa transisi pemerintahan. Terakhir di tahun 2018, nilai rupiah masih melemah 10,22% menjadi Rp 15.002 per dollar AS. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca berjalan, eskalasi perang dagang AS-Cina, krisis pasar berkembang di beberapa negara, dan ekonomi AS yang menguat.



4.1.4 Perkembangan BI Rate

Bank Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan moneter untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian, salah satu diantaranya adalah pengendalian suku bunga. Bank Indonesia berhak untuk mengeluarkan suku bunga Bank Indonesia atau disebut dengan BI Rate. BI Rate merupakan suku bunga acuan terhadap bank-bank umum atau lembaga keuangan lainnya. BI Rate juga mampu mengendalikan perekonomian di Indonesia. BI Rate mempunyai pengaruh dalam menjaga kestabilan nilai uang dan diumumkan kepada masyarakat dan bank umum lainnya secara transparan dan terbuka (Alvyonita dan Hidayat, 2014).

Pada periode 1967 hingga 1983 ekonomi Indonesia diupayakan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu 6 sampai 7% dan inflasi di bawah dua digit, kecuali di periode 1974-1978. Pada periode ini kebijakan ekonomi mulai diterapkan, diantaranya pengendalian suku bunga dan pengendalian uang beredar. Kredit menjadi lebih dibatasi dan ada pengaturan suku bunga. Lalu, pada tahun 1986-1987 kebijakan moneter mengarah pada pengendalian suku bunga (*interest rate targeting*). Kemudian di tahun 1990-1997 terjadi ekspansi kredit bank yang terlampau besar dan tidak selektif. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ketat dan menaikkan suku bunga.

Pada tahun 1999, kebijakan pengendalian uang beredar mulai ditinggalkan dan beralih ke pengendalian harga dengan BI Rate sebagai instrumen utama. Kemudian, pada tahun 2005, kebijakan ini diterapkan secara penuh dengan BI rate menjadi suku bunga acuan. Selama periode 2006-2010 trend BI Rate menurun. Pada tahun 2006 dan 2007 BI Rate menurun karena neraca pembayaran Indonesia pada tahun tersebut mencatat kinerja yang baik. Pemerintah menurunkan BI Rate

memberikan keleluasaan perekonomian agar dapat berkembang dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pada akhir



tahun 2008 dan awal tahun 2009 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat sebagai akibat ketidakpastian perekonomian global, sehingga BI Rate kembali naik.

Bank Indonesia melakukan kebijakan yang lebih besar dalam mengatasi inflasi dengan melakukan perubahan BI Rate lebih dari 25 bps (basis poin) dalam kelipatan 25 bps. Dalam tahun 2010-2012, Bank Indonesia mengeluarkan BI Rate setiap bulannya dengan stabil atau konstan. Akan tetapi pada tahun 2013, Bank Indonesia menaikkan BI Rate hingga 7,50%. Kemudian pada tahun 2014 naik lagi sebesar 25 bps menjadi 7,75%. Tahun 2015 turun kembali menjadi 7,50%. Langkah ini diambil sebab Bank Indonesia sedang melakukan upayanya dalam merespon semakin tingginya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan sistem keuangan ditengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memberlakukan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, menggantikan BI Rate. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Sepanjang 2016, Bank Indonesia telah memangkas BI7DRR beberapa kali. BI7DRR telah diturunkan sebesar 100 basis points (bps) menjadi 6,5%. Kemudian bulan Agustus turun lagi menjadi 5,25% dan akhirnya menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga patokan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik yang sedang dilanda kelesuan.

Pada tahun 2017, BI7DRR ditetapkan sebesar 4,25%, turun 50 bps dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan

keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.



Kemudian, pada tahun 2018 BI7DRR ditetapkan menjadi 6,00%, naik dari tahun sebelumnya. Bank Indonesia meyakini bahwa tingkat suku bunga kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

4.1.5 Perkembangan Belanja Pemerintah

Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara. Instrumen ini menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Bachtiar dkk, 2015).

Perkembangan belanja pemerintah berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi dari suatu negara. Jika belanja pemerintah meningkat maka perekonomian negara pun meningkat. Hal ini juga dialami oleh Indonesia, dimana baik nilai nominal maupun riil dari total belanja pemerintah terus meningkat sepanjang tahun.

Berdasarkan klasifikasi belanja negara terbaru, belanja negara digolongkan menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat dibedakan menjadi belanja K/L dan Non K/L yang secara keseluruhan meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lainnya. Sementara itu, transfer ke daerah dibagi menjadi dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Apabila dibandingkan dengan pos transfer ke daerah, pos belanja pemerintah pusat selalu lebih besar. Dalam pos belanja pemerintah ini, belanja subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja barang hampir selalu



lebih besar daripada belanja modal yang juga digunakan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan investasi.

Sama halnya apabila membandingkan belanja pemerintah dengan tidak menggunakan format *unified budget*, atau dengan kata lain dengan menggunakan format lama, dimana belanja pemerintah pusat dibedakan menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Dari kedua pos tersebut, pos belanja rutin juga selalu lebih besar daripada belanja pembangunan.

Tabel 4. 1 Total Pengeluaran Pemerintah Pusat (miliar rupiah)

Tahun	Belanja Pemerintah
2000	221.466,7
2001	341.562,7
2002	322.179,7
2003	376.505,2
2004	427.176,5
2005	509.632,4
2006	667.128,8
2007	757.649,8
2008	985.730,6
2009	937.381,9
2010	1.042.117,2
2011	1.294.999,2
2012	1.491.410,2
2013	1.650.563,7
2014	1.777.182,8
2015	1.806.515,2
2016	1.864.274,9
2017	2.007.351,8
2018	2.213.117,8

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, total belanja pemerintah mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2000 hingga 2018. Dari yang hanya sekitar 221.466,7 miliar rupiah menjadi 2.213 triliun rupiah pada kurun waktu 18 tahun.

tan pendapatan negara ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain tan kuantitas dan kualitas sumber daya, peningkatan akumulasi modal,



peningkatan kualitas teknologi yang digunakan serta faktor lainnya. Peningkatan belanja pemerintah secara total tidak berarti setiap sektor juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Besarnya belanja pemerintah di setiap sektor bergantung pada keputusan pemerintah dalam menentukan komposisi APBN. Dari tahun 1970 sampai 2015, Indonesia sudah mengalami pergantian kepemimpinan seorang presiden selama 6 kali. Perbedaan pemimpin akan terjadi juga perbedaan kementerian dan perbedaan komposisi APBN di tahun ia menjabat.

4.1.6 Perkembangan Harga Minyak Dunia

Harga minyak dunia selalu menjadi perhatian hampir seluruh negara baik negara produsen (eksportir) minyak bumi maupun negara konsumen (importir). Hal ini disebabkan karena peranan minyak yang sangat penting sebagai bahan bakar yang menggerakkan perekonomian suatu negara. Karena peran harga minyak dunia sangat penting maka, implikasi yang timbul akibat fluktuasi harga minyak juga akan beragam (Nizar, 2012).

Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan nilai ekspor negara produsen minyak (negara berkembang) meningkat, sedangkan bagi negara pengimpor (negara maju) berarti peningkatan biaya produksi. Hal ini mengakibatkan negara berkembang harus mengimpor *output* pengolahan minyak dari negara maju dan harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Ketika biaya produksi meningkat akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, maka *output* produk berkurang sehingga inflasi timbul karena permintaan terhadap produk lebih tinggi daripada penawaran. Indonesia menjadi salah satu negara net importer minyak dunia dikarenakan cadangan minyak Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan



konsumsi Indonesia yang mengakibatkan ekonomi Indonesia rentan terhadap perkembangan harga minyak yang berfluktuatif.

Grafik 4. 3 Harga Minyak Dunia (US dollar/barrel)



Sumber: U.S Energy Information

Harga rata-rata minyak dunia yang diimpor oleh semua negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 1998 sampai 2008. Awal tahun 2002 harga minyak dunia berada di sekitar 30,56 US dollar/barrel. Pada tahun 2008 kuartal kedua harga minyak dunia berada di level tertinggi menjadi 124,60 US dollar/barel. Krisis yang terjadi pada akhir 2008 di negara-negara Eropa membuat harga minyak dunia merosot hingga level 56,67 US dollar/barrel. Di tahun 2010 harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan menjadi 80,66 US dollar/barrel. Lonjakan harga minyak dunia ini mayoritas disebabkan oleh keterbatasan pasokan di satu sisi serta meningkatnya permintaan dunia di sisi lain.

Pada tahun 2010 terjadi kenaikan harga minyak dunia yang tinggi sehingga memberikan keuntungan besar bagi negara produsen tapi sekaligus menjadi bencana bagi negara-negara konsumen. Tahun 2011 harga minyak dunia berada pada 94,88 US dollar/barrel dan 2012 hanya menurun sedikit menjadi 94,05 US

rel.



Pada tahun 2013 harga minyak kembali naik menjadi 97,98 US dollar/barrel. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan negara- negara Industri seperti Cina, Amerika, Jerman. Kemudian tahun 2014-2016 harga minyak dunia turun hingga mencapai titik terendah yaitu mencapai 43,29 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi minyak bumi Amerika karena bertambahnya produksi minyak bumi di Amerika sehingga supply minyak dunia pada saat itu melebihi batas permintaan. Pada akhir tahun 2016 beberapa negara OPEC menyepakati kebijakan pemotongan produksi yang digunakan untuk mengatasi masalah supply yang berlebih. Kebijakan ini mempertahankan harga minyak di kisaran 40–60 US\$/barrel sehingga harga minyak dunia tahun 2017 dan 2018 berada pada 50,8 US dollar/barrel dan 65,23 US dollar/barrel.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel Inflasi (Y) yang merupakan variabel terikat, dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), jumlah uang beredar (X2), nilai tukar (X3), BI rate (X4), belanja pemerintah (X5), dan harga minyak dunia (X6) secara linier. Perumusan analisis ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh estimasi model regresi sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien Regresi	Probabilitas	Standard Error
ta	951.8873	0.0049	3.843774
Uang	33.35348	0.0065	9.146993



Nilai Tukar	20.42806	0.0257	7.471882
BI Rate	0.500262	0.3535	0.507881
Belanja Pemerintah	-47.49963	0.0039	11.8446
Harga Minyak Dunia	0.210742	0.0022	0.047645
R-squared	0.929302		
Signifikansi pada $\alpha = 5\%$			

Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 951,8 + 33,35X_1 + 20,42X_2 + 0,50X_3 - 47,49X_4 + 0,2107X_5$$

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,929 atau 92,9%. Hal ini berarti, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, nilai tukar, BI rate, belanja pemerintah dan harga minyak dunia mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu inflasi sebesar 92,9%. Variabel lain diluar model persamaan regresi terhitung hanya 7,1%.

4.2.1. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen maka parameter yang digunakan adalah nilai probabilitas. Apabila nilainya lebih kecil dari pada alpha (α) = 5% maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara parsial.

Pada tabel 4.2, variabel jumlah uang beredar, nilai tukar, belanja pemerintah dan harga minyak dunia memiliki nilai lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar (X2), nilai tukar (X3), belanja pemerintah (X4), jumlah uang beredar (X5), dan harga minyak dunia (X6) berpengaruh signifikan secara



parsial terhadap inflasi (Y). Sementara variabel BI Rate (X4) dengan nilai α diatas 5%, menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap inflasi (Y).

4.2.2. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen di dalam model terhadap variabel dependen secara simultan. Sama dengan uji statistik t maka parameter yang digunakan adalah nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari pada alpha (α) = 5% maka dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan.

Pada tabel 4.2, variabel jumlah uang beredar, nilai tukar, belanja pemerintah dan harga minyak dunia memiliki nilai lebih kecil dari α = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar (X2), nilai tukar (X3), belanja pemerintah (X5), dan harga minyak dunia (X6) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap inflasi (Y).

Sementara variabel BI Rate (X4) dengan nilai α diatas 5%, menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Y).

3.4.1. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (X2) terhadap Inflasi (Y)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa koefisien jumlah uang beredar adalah 33,35 dengan probabilitas sebesar 0,0065. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, dalam hal ini M2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, ketika terjadi peningkatan jumlah uang

sebesar 1% maka inflasi akan meningkat sebesar 33.35%.



Pengaruh yang signifikan dan positif antara jumlah uang beredar terhadap inflasi menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia ditentukan oleh jumlah uang beredar dengan arah yang bersamaan. Apabila jumlah uang beredar meningkat maka inflasi akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah uang beredar menurun maka inflasi juga akan turun.

Ketika jumlah uang beredar bertambah maka jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat meningkat. Kecenderungan untuk menyimpan uang tunai akhirnya menjadi berkurang karena dihabiskan untuk konsumsi. Ketika konsumsi meningkat, maka permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Masyarakat menjadi konsumtif karena daya beli semakin meningkat. Jika tidak diimbangi oleh peningkatan produksi jumlah barang dan jasa maka harga barang dan jasa akan naik karena terjadi kelangkaan. Apabila masyarakat masih terus menambah pengeluarannya maka akan mendorong produsen untuk menaikkan harga barang dan jasanya. Ketika harga naik secara umum maka akan timbul inflasi. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia.

Rahardja dan Manurung (2008) menyatakan bahwa perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan perekonomian. Apabila perekonomian semakin maju, porsi penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam) semakin sedikit, digantikan uang giral. Perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan semakin maju sebab komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil dan porsi M2 semakin besar. Jika dibandingkan dengan M1, pertumbuhan M2 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peredaran uang M2 lebih dominan dibandingkan M1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian

semakin maju dan meningkat dari tahun ke tahun.



Peningkatan jumlah uang beredar di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, komponen uang beredar itu sendiri yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi, Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets / NFA*) dan Aktiva dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets / NDA*). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government / NCG*) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk Pinjaman yang diberikan. Perbaikan likuiditas perekonomian ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perekonomian masyarakat.

Hasil estimasi ini membuktikan teori kuantitas uang yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Teori ini mengatakan bahwa semakin tinggi jumlah uang yang beredar maka daya beli masyarakat semakin meningkat. Permintaan meningkat sementara *supply* barang dan jasa semakin berkurang. Hal ini menyebabkan harga meningkat dan menimbulkan inflasi.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil estimasi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Amrini dkk (2014), Watulingas dkk (2016), Agusmianata (2017), serta yuliandari dan Hariyanti (2016). Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

Namun terdapat pula beberapa hasil penelitian dengan hasil berbeda, seperti penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Wahyu (2017), Mahendra (2016), Kalalo (2016), serta Halim (2015). Hasil penelitian Rahmawati dan Wahyu menyatakan bahwa jumlah uang beredar hanya berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek. Kemudian

(2016) memperoleh hasil penelitian dimana jumlah uang beredar tidak



memiliki pengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Mahendra (2016) menyatakan bahwa jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Halim dkk (2015) menyatakan bahwa JUB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sipayung dan Budhi (2013) yang berjudul Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap inflasi di Indonesia Periode 1993-2012 menyatakan bahwa variable jumlah uang beredar berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1993-2012. Namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir hasil penelitian Utami dan Soebagiyo (2013) juga menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

3.4.2. Pengaruh Nilai Tukar (X3) terhadap Inflasi (Y)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa koefisien nilai tukar adalah 20,42 dengan probabilitas sebesar 0,0257. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, Ketika terjadi peningkatan nilai tukar sebesar 1% maka inflasi akan meningkat sebesar 20,42%.

Peningkatan nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut seperti spekulasi global, kenaikan bunga dollar AS, kelebihan likuiditas, serta krisis yang terjadi di negara seperti Amerika dan Yunani. Pada tahun 2018, ketidakpastian global yang tinggi dan memberikan tekanan kepada neraca pembayaran Indonesia (NPI) banyak mempengaruhi dinamika nilai tukar rupiah.

astian tersebut dipicu oleh berlanjutnya kenaikan *Federal Funds Rate* n ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini mengakibatkan mata



uang dollar AS menguat secara global. Perkembangan ini tidak menguntungkan karena meningkatkan perilaku *risk averse* penempatan dana di negara. Aliran masuk modal asing ke negara berkembang berkurang, termasuk Indonesia. Tekanan depresiasi terhadap Rupiah juga searah dengan pelemahan banyak mata uang negara berkembang lain, sejalan dengan dampak ketidakpastian global yang meningkat tersebut.

Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi kinerja ekspor neto Indonesia yang menurun. Di satu sisi, permintaan terhadap valas tinggi dipengaruhi kenaikan impor, sejalan dengan permintaan domestik yang solid. Di sisi lain, pasokan valas dari kinerja ekspor mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan harga komoditas yang menurun.

Peningkatan tensi perdagangan Amerika dan Cina juga berdampak pada tekanan terhadap Rupiah. Kebijakan Amerika yang menerapkan pengenaan tarif sebesar 25% terhadap produk impor dari Cina memicu retaliasi Cina dalam bentuk penerapan tarif terhadap 106 produk impor dari Amerika. Hal ini mendorong kenaikan premi resiko di negara berkembang.

Ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi maka harga barang impor akan naik yang menyebabkan biaya bahan baku impor juga ikut naik. Naiknya biaya bahan baku impor menyebabkan output produksi menurun. Penurunan output produksi akan menyebabkan terjadinya kelangkaan barang-barang hasil produksi sehingga inflasi naik.

Dari sisi penawaran, depresiasi nilai tukar akan menyebabkan harga barang luar negeri relatif lebih tinggi dibandingkan barang dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dalam negeri baik dari permintaan

maupun permintaan luar negeri terhadap barang ekspor. Kenaikan ini akan memicu kenaikan harga sehingga inflasi akan naik.



Nilai mata uang yang turun dapat mengakibatkan barang-barang produksi lokal (dalam negeri) yang mempunyai kandungan impor tinggi akan mengalami kenaikan biaya produksi yang menyebabkan harga jual kepada konsumen meningkat. Hal ini akan menaikkan harga produksi dalam negeri dan konsumsi masyarakat menurun. Harga barang dan jasa pun akan mengalami kenaikan sehingga berujung pada terjadinya inflasi.

Hasil estimasi ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan mengenai hubungan nilai tukar dan inflasi. Menurut teori PPP (*purchasing power parity*) rupiah menguat karena kestabilan atau rendahnya inflasi dengan asumsi harga luar negeri (*foreign price*) ceteris paribus. Artinya, nilai tukar berhubungan positif dengan inflasi.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil estimasi ini adalah penelitian Amrini dkk (2014). Berdasarkan hasil penelitiannya kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sipayung dan Budhi (2013) menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Kemudian Utami dan Soebagiyo (2013) juga memiliki hasil penelitian yang sejalan, dimana variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.

Sementara itu, penelitian yang berbeda dengan hasil estimasi ini adalah penelitian Deviana (2014), Yuliandari dan Hariyati (2016), Kalalo dkk (2016), dan Halim dkk (2015). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Mahendra (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi.



3.4.3. Pengaruh BI Rate (X4) terhadap Inflasi (Y)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa koefisien BI Rate adalah 0,50 dengan probabilitas sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap inflasi. Artinya Ketika terjadi peningkatan BI Rate sebesar 1% maka inflasi akan meningkat sebesar 0,50%.

Hasil estimasi pada penelitian ini telah membuktikan bahwa instrumen kebijakan moneter melalui BI rate tidak memberikan dampak yang berpengaruh dalam menstabilkan tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan naik turunnya inflasi bersifat sementara dan disebabkan karena situasi dan keadaan tertentu. Sepanjang periode pengujian, kenaikan ataupun penurunan inflasi sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas terutama komoditas pertanian serta kenaikan harga BBM yang turut meningkatkan harga barang kebutuhan pokok selama kurun waktu periode.

Rantai jaringan sistem bunga dalam kegiatan perbankan, mulai dari BI rate yang selanjutnya menjadi standar acuan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Otoritas moneter menaikkan suku bunganya untuk mempengaruhi suku bunga perbankan yaitu suku bunga tabunga, deposito, dan kredit.

Kenaikan pada suku bunga tabungan dan deposito akan membuat seseorang atau masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya guna mendapatkan bunga yang tinggi. Selain itu, kenaikan pada suku bunga kredit akan membuat permintaan kredit dari seseorang atau perusahaan akan menurun sehingga tidak ada lagi penambahan kapasitas produksi. Dengan demikian pada

akan menurunkan tekanan inflasi.



Namun, pengaruh suku bunga simpanan Bank Umum terhadap inflasi tidak diikuti oleh suku bunga pinjaman Bank umum. Padahal uang yang dikumpulkan melalui simpanan diharapkan akan disalurkan melalui kredit (pinjaman) untuk meningkatkan gairah pasar. Sehingga antara simpanan dan pinjaman sama-sama mampu menekan laju inflasi.

Tingkat bunga yang tinggi akan menjadi masalah yang menyulitkan bagi investasi di sektor riil. Tapi tingkat bunga yang tinggi akan merangsang lebih banyak tabungan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat fluktuasi bunga harus senantiasa terkontrol agar tetap mendorong kegiatan investasi dan produksi serta tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan tidak mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri.

Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan teori suku bunga klasik yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka. Berdasarkan teori suku bunga klasik, Ketika suku bunga meningkat maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Hal ini mengakibatkan inflasi turun. Dari segi investasi, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan inflasi meningkat.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil estimasi ini adalah penelitian dari Mahendra (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang

Suku Bunga SBI dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia.

Menurut penelitiannya, suku bunga SBI berpengaruh positif namun tidak



signifikan terhadap inflasi. Amrini dkk (2014), Agusmianata dkk (2017), Kalalo dkk (2016) serta Rahmawati dan Wahyu (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa BI rate mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap inflasi. Sementara Deviana (2014) serta Yuliandari dan Hariyanti (2016) mengatakan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap variabel inflasi.

3.4.4. Pengaruh Belanja Pemerintah (X5) terhadap Inflasi (Y)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa koefisien belanja pemerintah adalah -47,49 dengan probabilitas sebesar 0,0039. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, Ketika terjadi peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% maka inflasi akan menurun sebesar 47,49%.

Terdapat tiga bentuk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal dijalankan oleh kementerian keuangan dan alat yang digunakan adalah melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (perpajakan). Secara spesifik, Ketika pemerintah memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran atau belanjanya maka akan disebut kebijakan fiskal ekspansioner. Sebaliknya, Ketika pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluarannya maka disebut kebijakan fiskal kontraksioner.

Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengambil kebijakan dampak multiplier dari pengeluaran investasi pemerintah. Dalam belanja pemerintah, salah satunya

belanja infrastruktur yang diperkirakan dapat memperbaiki distribusi dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi.



Hasil estimasi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Agusmianata dkk (2017) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Sementara itu, berbeda dengan hasil estimasi, penelitian Watulingas dkk (2016) menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

3.4.5. Pengaruh Harga Minyak Dunia (X6) terhadap Inflasi (Y)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa koefisien harga minyak dunia adalah 0.210 dengan probabilitas sebesar 0.0022. Hal ini menunjukkan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, ketika terjadi peningkatan harga minyak dunia sebesar 1% maka inflasi akan meningkat sebesar 0.210%.

Kenaikan harga minyak di pasar dunia akan menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia harus mengimpor *output* pengolahan minyak dari negara maju dan harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Ketika biaya produksi meningkat akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, maka *output* produk berkurang. Hal ini menyebabkan inflasi meningkat karena permintaan terhadap produk lebih tinggi daripada penawaran.

Secara lebih rinci, fluktuasi harga minyak di pasar dunia akan mendorong laju inflasi domestik. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga minyak yang lebih tinggi akan diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak seperti bensin dan bahan bakar lainnya yang digunakan untuk proses produksi dalam perekonomian. Sehingga, meningkatnya harga input akan direspon oleh perusahaan dengan

tan harga produk barang dan atau jasa akhir yang disediakan untuk
kat.



Menurut data dari BP *Statistical Review* tahun 2017, diketahui bahwa konsumsi energi Indonesia pada tahun 2018 meningkat sebesar 3,9 persen. Jumlah produksi minyak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tahun 2018 hanya mencapai 54 persen. Hal ini berarti, kebutuhan minyak dalam negeri yang tidak diiringi dengan jumlah produksi yang memadai mengharuskan Indonesia untuk mengimpor minyak guna menjaga perekonomian agar tetap kondusif.

Harga minyak mentah yang terus berfluktuatif di pasar dunia diakibatkan oleh penawaran dan permintaan minyak yang tidak seimbang ditambah intervensi OPEC yang kerap membuat harga minyak meningkat. Semenjak Indonesia menjadi negara *net importer*, muncul persepsi bahwa harga minyak membawa dampak buruk bagi perekonomian yaitu inflasi yang menyebabkan turunnya permintaan agregat akibat kenaikan biaya produksi.

Fluktuasi harga minyak adalah melemah atau menguatnya harga minyak secara tajam. Fluktuasi harga minyak merupakan sebuah siklus yang telah terjadi berkali-kali pada industri migas. Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara importir minyak terbesar akibat ketergantungan terhadap minyak yang sangat tinggi guna menggerakkan perekonomian. Peranan minyak bumi sangat besar dalam kegiatan ekonomi sebagai input produksi di tingkat perusahaan maupun untuk konsumsi di tingkat rumah tangga. Kenaikan harga minyak dunia akan mempengaruhi harga dalam negeri. Pemerintah mengambil kebijakan pemberian subsidi untuk masyarakat seperti subsidi bahanbakar minyak, pupuk, listrik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menekan harga produksi barang yang meningkat karena naiknya harga minyak.

Hasil estimasi ini sejalan dengan teori Blanchard yang telah dikemukakan

dan pustaka. Menurut Blanchard, ketika terjadi kenaikan harga minyak maka perusahaan akan merespon dengan menaikkan markup sehingga



harga naik sementara upah tetap. Secara lebih rinci, ketika harga minyak dunia naik maka akan diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak seperti bensin. Ketika harga bensin atau bahan bakar naik maka secara tidak langsung berdampak pada perusahaan. Harga produksi akan lebih mahal sehingga harga jual pun semakin meningkat.

Hasil estimasi ini tidak sejalan dengan penelitian Kalalo dkk (2016) dan Halim dkk(2015). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa harga minyak dunia memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang beragam terhadap variabel-variabel yang telah diteliti. Secara lebih rinci dapat kita ketahui bahwa :

1. Variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sebesar 33,35%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh komponen uang beredar itu sendiri yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi, Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets / NFA*) dan Aktiva dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets / NDA*).
2. Variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, peningkatan nilai tukar sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sebesar 20,42%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh spekulasi global, kenaikan bunga dollar AS, kelebihan likuiditas, krisis yang terjadi di negara seperti Amerika dan Yunani, serta kinerja ekspor neto Indonesia yang menurun.
3. Variabel BI rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dikarenakan naik turunnya inflasi bersifat sementara dan disebabkan karena sepanjang periode pengujian, kenaikan ataupun penurunan inflasi sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas terutama komoditas pertanian serta kenaikan harga BBM



yang turut meningkatkan harga barang kebutuhan pokok selama kurun waktu periode.

4. Variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% akan menurunkan inflasi sebesar 47,49%. Hal ini disebabkan karena dampak multiplier dari belanja pemerintah yang lebih besar dalam belanja infrastruktur
5. Harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, peningkatan harga minyak dunia sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sebesar 0.210%. Hal ini disebabkan oleh penawaran dan permintaan minyak yang tidak seimbang serta intervensi OPEC yang kerap membuat harga minyak meningkat.

4.2. Saran

1. Kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar sudah cukup efektif dilaksanakan mengingat pertumbuhan jumlah uang beredar cukup terkendali dan mampu menjaga stabilitas inflasi. Otoritas moneter (Bank Indonesia) diharapkan tetap mempertahankan kinerjanya dalam mengendalikan dan menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar.
2. Melihat pengaruh nilai tukar yang positif dan signifikan terhadap inflasi maka otoritas moneter (Bank Indonesia) harus mampu menjaga kestabilan cadangan devisa negara demi menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.



3. Meskipun BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi pada periode penelitian namun pengendalian BI rate juga harus senantiasa dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.
4. Belanja pemerintah yang lebih difokuskan pada belanja infrastruktur cukup efektif menurunkan inflasi pada periode waktu penelitian sehingga diharapkan pemerintah tetap mempertahankan kinerjanya dan perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap dengan baik.
5. Meskipun memiliki presentase pengaruh yang kecil, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan akan komoditas minyak dunia dan lebih akurat dalam memprediksi harga minyak di masa akan datang agar dapat meminimalisir terjadinya inflasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusmianata, Nuri, Theresia Militina, dan Diana Lestari. 2017. Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Belanja pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Forum Ekonomi Universitas Mulawarman*. Volume 19, No. 2
- Alvyonita, Maria, Paidi Hidayat. 2014. Analisis Kausalitas antara BI Rate dengan Jumlah Uang Beredar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Universitas Sumatera Utara*. Volume 2, No. 10.
- Amrini, Yassirlii, Hasdi Aimon, dan Efrizal Syofyan. 2014. Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi IPB*. Volume 2, No. 4
- Ardiansyah, Herman. 2017. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*. Volume 5 Nomor 3.
- Arifin, Yaenal. 2016. Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Economics Development Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*. Volume 5, No.4
- Atmadjaja, Y.V. I. 2013 Konsep Purchasing Power Parity dalam Penentuan Kurs Mata Uang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi* Vol. 1 No 1).
- Bachtiar, Hangga Filardikh, Eleonora Sofilda, Sri Yani Kusumastuti. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013. *Conference paper Seminar Nasional Cendekiawan 2015*
- BI 7-day (Reverse) Repo Rate. 2013. (Online), www.bi.go.id, diakses tanggal 15 Agustus 2019
- Boediono. 2009. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Case, Karl dan Ray C. Fair. 2007 *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Terjemahan oleh Benyamin Molan. Jakarta: PT. Prenhallindo, hlm 212
- Cognigni, Alessandro, Matteo Manera. 2008. Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries. *Energy Economics*. Vol. 30 Issue 3.
- Darmayanti, Novi. 2014. Pengaruh GDP terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan*. Volume 3 Nomor 1.
- Deviana, Nyimas. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit, dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Periode tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya*. Vol. 12, No. 2
- Djambak, Syaipan. 2011. Keterkaitan antara Agregte Demand dengan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya*.
- Engle, R.F dan C. W. J. Granger. Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Journal of Finance and Economics University of Botswana*. Vol. 55, No. 2



- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*. Jakarta: Salemba Empat
- Fauzannissa, R.A, H. Yassin, D. Ispriyanti. 2016. Peramalan Harga Minyak Mentah Dunia menggunakan Metode Radial Basis Function Neural Network. *Jurnal Gaussian Statistika Universitas Diponegoro*. Vol. 5, No. 1.
- Halim, Elani Umiyatul, Lilis Yuliaty, Siswoyo Hari Santosa. 2015. Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia, Harga Emas, JUB, dan Kurs terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001.1-2013.12. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- Hudaya, Afaqa. 2011. Analisis Kurs, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga SBI terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001-2010. *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Inflasi*. 2018. (Online), www.bi.go.id, diakses tanggal 3 Agustus 2019
- Junaidi, Agus. 2016. Analisis Trade-Off Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi Universitas Mulawarman*. Volume 18, No. 1
- Kalalo, Harjunata. Y.T, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th. B. Maramis. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*. Volume 16, No. 1
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Langi, Theodores Manuela, Vecky Masinambow, Hanly Siwu. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*. Volume 14 no. 2
- Madjid, Abd, Shabri, M. 2016. The Short-run and Long-run Relationship in Indonesian Islamic Stock Returns. *Journal of Islamic*. Vol 8. No 1.
- Madura, Jeff. 2009. *International Corporate Finance. Keuangan Perusahaan Internasional* (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat
- Mahendra. A. 2016. Analisis Pengaruh JUB, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 5. No.204.
- Mankiw, N. G. 2006. *Principles of Economics : Pengantar Ekonomi Makro* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw N. G. 2007. *Teori Makroekonomi Edisi Keenam*. Terjemahan oleh Iman N. Jakarta: Erlangga.
- Minanda, Rahayu. 2008. *Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Murni, A. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.

A. 2012. Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia terhadap Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Vol. 6 No.2



- Perkembangan Uang beredar*. 2013. (Online), www.bi.go.id, diakses tanggal 31 Juli 2019.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi (Edisi Ketiga)*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Rahmawati, D. A. Dwi, Wahyu Hidayat Riyanto. 2017. Analisis Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Jumlah Uang Beredar terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2006.1-2015.1 (Pendekatan *Error Correction Model*). *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol. 1, No. 1
- Simorangkir, I. dan Suseno. 2004. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar Seri Kebanksentralan (No.12)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Sipayung, Putri .T. Enistin, Made Kembar Sri Budhi. 2013. Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1993-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 3 No. 7.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Siti Astiyah. 2009. *Inflasi Seri Kebanksentralan (no. 22)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI
- Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (edisi 1)*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 342
- Utami, Anissa Tri, Daryono Soebagiyo. 2013. Penentu Inflasi di Indonesia; Jumlah Uang beredar, Nilai Tukar, atukah Cadangan Devisa?. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Volume 14, Nomor 2.
- Watulingas, Judi, Tri Ody Rotinsulu, dan Hanly F. Dj. Siwu. 2016. Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia (Periode Tahun 2000 2014) *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*. Volume 16, No. 1
- Yodiatmaja, Banu. 2012. Hubungan antara BI Rate dan Inflasi Pendekatan Kausalitas Toda – Yamato. *Journal of Economics and Policy Universitas Negeri Semarang*. Vol. 5, No. 2
- Yuliandari, Annisa, Dini Hariyanti. 2016. Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Tingkat Inflasi di ASEAN-5. *Jurnal Media Ekonomi Universitas Trisakti*. Volume 24, Nomor 1.
- Zakinah, Umaruddin Usman. Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia, menggunakan Model *namis*. *Jurnal Ekonomi Regionl Universitas Malikussaleh*. Volume 2 no.



LAMPIRAN

Lampiran 1

TAHUN	INFLASI	M2	ER	BIRATE	GE	WTI
2005	17.11	1202762	9,830.00	12.75	509,632,439,535,365	56.64
2006	6.6	1382493	9,020.00	9.75	667,128,856,756,584	66.05
2007	6.59	1649662	9,419.00	8.00	757,649,855,426,686	72.34
2008	11.06	1895839	10,950.00	9.25	985,730,693,425,001	99.67
2009	2.78	2141384	9,400.00	6.50	937,381,964,695,000	61.95
2010	6.96	2471206	8,991.00	6.50	1,042,117,225,150,490	79.48
2011	3.79	2877220	9,068.00	6.00	1,294,999,230,000,000	94.88
2012	4.3	3304645	9,670.00	5.75	1,491,410,224,138,120	94.05
2013	8.38	3730197	12,189.00	7.50	1,650,563,727,418,080	97.98
2014	8.36	4173327	12,440.00	7.75	1,777,182,855,786,410	93.17
2015	3.35	4548800	13,795.00	7.50	1,806,515,202,066,310	48.66
2016	3.02	5004977	13,436.00	4.75	1,864,274,991,894,970	43.29
2017	3.61	5419165	13,548.00	4.25	2,007,351,800,000,000	50.8
2018	3.13	5760046	14,481.00	6.00	2,213,117,817,284,990	65.23



Lampiran 2

TAHUN	INFLASI	LN PDB	LN M2	LN ER	BIRATE	LN GE	WTI
2005	17.11	15.4627 3	14.0001 3	9.19319 4	12.75	33.8647 1	56.64
2006	6.6	15.5162 8	14.1394	9.1072	9.75	34.134	66.05
2007	6.59	15.5777 9	14.3160 8	9.15048 4	8.00	34.2612 4	72.34
2008	11.06	15.6361 9	14.4551 7	9.30109 5	9.25	34.5244	99.67
2009	2.78	15.6814 4	14.5769 6	9.14846 5	6.50	34.4741 1	61.95
2010	6.96	15.7418 2	14.7202 2	9.10397 9	6.50	34.5800 3	79.48
2011	3.79	15.8016 9	14.8723 4	9.11250 7	6.00	34.7972 9	94.88
2012	4.3	15.8602 4	15.0108 4	9.17678 4	5.75	34.9385	94.05
2013	8.38	15.9143 3	15.1319 7	9.40828 9	7.50	35.0398 9	97.98
2014	8.36	15.9631 8	15.2442 2	9.42867 2	7.75	35.1138 1	93.17
2015	3.35	16.0107 9	15.3303 7	9.53206 1	7.50	35.1301 8	48.66
2016	3.02	16.0599	15.4259 4	9.50569 3	4.75	35.1616 5	43.29
2017	3.61	16.1093 5	15.5054 5	9.51399 4	4.25	35.2355 9	50.8
2018	3.13	16.1597 6	15.5664 6	9.58059 3	6.00	35.3331 8	65.23



Lampiran 3

Dependent Variable: INF

Method: Least Squares

Date: 11/03/20 Time: 23:14

Sample: 2005 2018

Included observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
M2	33.35348	9.146993	3.646388	0.0065
ER	20.42806	7.471882	2.733991	0.0257
BIRATE	0.500262	0.507881	0.984999	0.3535
GE	-47.4996	11.8446	-4.01023	0.0039
WTI	0.210742	0.047645	4.423221	0.0022
C	951.8873	247.6439	3.843774	0.0049
R-squared	0.929302	Mean dependent var		6.36
Adjusted R- squared	0.885116	S.D. dependent var	Akaike info	4.000763
S.E. of regression	1.356042	critierion		3.744544
Sum squared resid	14.71079	Schwarz criterion	Hannan-Quinn	4.018426
Log likelihood	-20.2118	critier.	Durbin-Watson	3.719191
F-statistic	21.03149	stat		2.456121
Prob(F-statistic)	0.000207			



Lampiran 4**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Talita Maria Walujan
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 23 Mei 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : BTN Tabaria B7 no. 10
 Nomor Hp : 08975548812
 Alamat *E-mail* : talitamw23@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal

1. SD Katolik Hati Kudus Rajawali Makassar Tahun 2003-2009
2. SMP Katolik Rajawali Makassar Tahun 2009-2012
3. SMA Katolik Rajawali Makassar Tahun 2012-2015
4. S1 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Tahun 2015-2020

Pendidikan Non-Formal

1. *Basic Character and Study Skill (BCSS)* Universitas Hasanuddin 2015

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
2. Pengurus Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun Makassar tahun 2015-2020
3. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak GPIB Bukit Zaitun Makassar tahun 2020

Makassar, 8 November 2020

Talita Maria Walujan

